



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 050/Kep.2223-Bappelitbang/2022  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG  
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2022-2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022-2023.
- KEDUA : Rincian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kota Bandung.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Agustus 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR : 050/Kep.2223-Bappelitbang/2022  
 TANGGAL : 31 Agustus 2022

**INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2023**

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran RPJMD Perubahan	Satuan	Target		Keterangan
					2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pendidikan masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,22	14,23	IKU
		2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,77	10,78	IKU
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,96	73,98	IKU
3	Meningkatnya masyarakat kota yang humanis	4	<i>Indeks Liveable City</i> Aspek Sosial Budaya	Poin	6,7	6,8	IKU
4	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	5	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM 'Baik'	Persen	90	100	IKU
		6	Nilai AKIP	Predikat	A	A	IKU
		7	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	-
		8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,30	3,35	-
		9	Nilai EPPD	Skor	3,4033	3,4044	-
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	10	Indeks Daya Saing Pariwisata	poin	3,30	3,31	-
		11	Angka Kemiskinan	poin	3,32	3,14	IKU

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran RPJMD Perubahan	Satuan	Target		Keterangan
					2022	2023	
	Pemerataan Perekonomian Kota	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	10,86	10,26	IKU
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	44,10	44,20	IKU
		14	Persentase Luasan RTH	persen	13,00	13,20	-
		15	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	persen	98,70	99,00	-
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas		<i>Indeks Liveable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur (Indikator Tujuan)	Poin	7,875	8,00	IKU
		16	Persentase Penurunan Kemacetan	persen	14,78	7,83	-
		17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	persen	2,76	2,16	-
		18	Cakupan Pelayanan Air Minum	persen	82	83	-
		19	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	50,00	41,18	-
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	20	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen	6,48	6,69	-

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT  
 DAERAH KOTA BANDUNG



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,  
 TTD

YANA MULYANA

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR : 050/Kep.2223-Bappelitbang/2022  
 TANGGAL : 31 Agustus 2022

**DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI PENGUKURAN DAN SUMBER DATA  
 INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN ATAU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 - 2023**

**MISI 1 : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG HUMANIS, AGAMIS, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana :            HLS<sub>a</sub><sup>t</sup> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t            E<sub>i</sub><sup>t</sup> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t            i = Usia (a, a + 1, ..., n)            FK = Faktor koreksi pesantren</p>	Dinas Pendidikan	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n Xi$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas Xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Dinas Pendidikan	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	UHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup.	$UHH = \frac{\text{Jumlah Umur Orang Meninggal}}{\text{Jumlah Orang Meninggal}}$	Dinas Kesehatan	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4. Dinas Pemuda dan Olah Raga 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
3	Meningkatnya masyarakat kota yang humanis	<i>Indeks Liveable City</i> Aspek Sosial Budaya	Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya khususnya pada aspek sosial budaya. Indeks ini merupakan pionir indeks yang berbasiskan pada survey dan persepsi warga kota.	Konversi nilai indikator ke dalam skala 0-10 berbeda-beda tergantung pada jenis data dan satuan yang digunakan. Selain itu untuk aturan konversi indikator subjektif dengan menggunakan skala Likert adalah angka 1-4. Nilai indikator yang menggunakan skala likert dihitung dengan menghitung rerata dari nilai likert yang terkumpul. Dengan demikian, nilai rerata maksimal adalah 4 dan minimal adalah 1. Cara mengonversi nilai rerata likert ke dalam skala 0-10 adalah dengan mengalikan nilai rerata likert dengan 2.5. Dengan demikian, nilai maksimal indikator yang menggunakan data skala Likert adalah 10, dan nilai minimal adalah 2.5	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pendidikan	

**MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERSIH**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM 'Baik'	IKM berkategori Baik adalah nilai hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan perangkat daerah yang telah memenuhi kriteria nilai minimal sebesar 85 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang hasil survey kepuasan pelayanan minimal sebesar 85 dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung	Seluruh Perangkat Daerah
2		<b>Nilai AKIP</b>	<b>Nilai</b> hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kementrian	Nilai AKIP Kota Bandung diukur sesuai dengan Permenpan No. No. 12 Tahun 2015 tentang	1. Bagian Organisasi Sekretariat	Seluruh Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
			<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian AKIP didasarkan pada penilaian 4 komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja</li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</li> </ol>	<p>Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai AKIP = 30% Perencanaan Kinerja + 30% Pengukuran Kinerja + 15%</p>	<p>Daerah Kota Bandung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bappelitbang</li> <li>3. Inspektorat</li> </ol>	
3		<b>Opini BPK</b>	<p>Pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di dapat dari pemenuhan beberapa kriteria penilaian seperti kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kriteria Opini BPK :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatasan lingkup</li> <li>2. Materialitas</li> <li>3. SPI yang memadai</li> <li>4. Kesesuaian dengan SAP</li> </ol> <p>Berdasarkan 4 kriteria tersebut di atas, terdapat 5 kategori capaian opini BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Unqualified opinion</i> (Pendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian)</li> <li>b. <i>Unqualified opinion with modified wording</i> (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan)</li> <li>c. <i>Qualified opinion</i> (Pendapat Wajar Dengan Pengecualian)</li> <li>d. <i>Adverse opinion</i> (Pendapat Tidak Wajar)</li> <li>e. <i>Disclaimer</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat</li> <li>2. BKAD</li> </ol>	Seluruh Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
4		<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	<p>Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Domainsi adalah nilai indeks domain ke-i;</li> <li>• BDi adalah nilai bobot domain ke-i;</li> <li>• NAij adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i;</li> <li>• BAij adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-I</li> </ul>	1. Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
5		<b>Nilai EPPD</b>	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.	Nilai EPPD diukur dari skor evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	Seluruh Perangkat Daerah

**MISI 3 : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI, KOKOH, DAN BERKEADILAN**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Indeks Daya Saing Pariwisata	<p>Indeks Daya Saing Pariwisata merupakan salah satu parameter yang diukur Kementerian Pariwisata untuk menetapkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI). Penyusunan indeks diperoleh melalui survei dan mengacu pada <i>Travel and Tourism Competitiveness Index</i> (TTCI) yang dikeluarkan <i>World Economic Forum</i> (WEF) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan rentang skala indeks 0-5.</p> <p>Indeks Daya Saing Pariwisata adalah tolok yang mengukur faktor-faktor kebijakan suatu wilayah, yang memungkinkan adanya pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pengembangan suatu wilayah.</p>	<p>Indeks Daya Saing Pariwisata diukur melalui 4 (empat) Dimensi yang diukur untuk menentukan tingkat daya saing pariwisata, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan yang memungkinkan, yang terdiri dari 5 (lima) parameter, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkungan Bisnis yang terdiri dari 11 (sebelas) indikator</li> <li>b. Keselamatan dan keamanan yang terdiri dari 5 (lima) indikator</li> <li>c. Kesehatan dan kebersihan yang terdiri dari 6 (enam) indikator</li> <li>d. Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator</li> <li>e. Kesiapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terdiri dari 8 (delapan) indikator</li> </ol> </li> <li>2. Kebijakan kepariwisataan yang terdiri dari 4 (empat) parameter, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prioritas terhadap Sektor Perjalanan &amp; Pariwisata (T&amp;T) yang terdiri dari 6 (enam) indikator</li> <li>b. Keterbukaan Internasional yang terdiri dari 3 (tiga) indikator</li> <li>c. Daya saing harga yang terdiri dari 4 (empat) indikator</li> <li>d. Kelestarian Lingkungan yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator</li> </ol> </li> </ol>	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>3. Badan Pendapatan Daerah</li> <li>4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>5. Dinas Kesehatan</li> <li>6. Dinas Pendidikan</li> <li>7. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>8. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>9. Dinas Perhubungan</li> <li>10. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga</li> <li>11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>12. Dinas Lingkungan Hidup</li> </ol>

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
				<p>3. Infrastruktur yang terdiri dari 3 (tiga) parameter yaitu:</p> <p>a. Infrastruktur transportasi udara yang terdiri dari 6 (enam) indikator</p> <p>b. Infrastruktur transportasi darat dan Pelabuhan yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator</p> <p>c. Infrastruktur layanan turis (wisatawan) yang terdiri dari 4 (empat) indikator</p> <p>4. Sumber Daya Alam dan Budaya yang terdiri dari 2 (dua) parameter yaitu:</p> <p>a. Sumber Daya Alam yang terdiri dari 5 (lima) indikator</p> <p>b. Sumber Daya Budaya dan Perjalanan Bisnis yang terdiri dari 5 (lima) indikator</p> <p>Diukur dengan :</p> <p><b>Indeks Daya Saing Pariwisata =</b></p> <p><b>Hasil normalisasi data dimensi 1 + dimensi 2 + dimensi 3 + dimensi 4</b></p> <p><u>Konversi data:</u></p> <p>Formula/rumus standar untuk mengonversi setiap indikator data mentah menjadi skala 1-7 adalah:</p> $6 \times \left( \frac{\text{skor negara} - \text{sampel minimum}}{\text{sampel maksimum} - \text{sampel minimum}} \right) + 1$		<p>13. Dinas Pemuda dan Olah Raga</p> <p>Non Perangkat Daerah:</p> <p>14. Polri/Polres</p> <p>15. Telkom</p> <p>16. PLN</p> <p>17. Angkasa Pura</p> <p>18. PT KAI</p> <p>19. ATR/BPN</p>

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
				<p>Normalisasi data (setelah konversi data)</p> $X_m = \frac{[X_m(n) - \min X_m(n)]}{[\max X_m(n) - \min X_m(n)]}$ <p>Dimana:</p> <p><math>X_m</math> = nilai variabel yang diukur setelah proses normalisasi data</p> <p><math>\max X_m(n)</math> = nilai maksimum pada suatu kriteria tertentu dari seluruh data</p> <p><math>\min X_m(n)</math> = nilai minimum pada suatu kriteria tertentu dari seluruh data</p> <p><math>X_m(n)</math> = variabel yang diukur</p>		
2		Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.	<p>Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.</p> $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dimana:</p> <p>Po = Persentase penduduk miskin</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : yi &lt; z</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial</li> <li>2. Dinas Kesehatan</li> <li>3. Dinas Pendidikan</li> <li>4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>6. Dinas Ketenagakerjaan</li> </ol>	Kecamatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
				n = Jumlah penduduk	7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
3		Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	1. Dinas Ketenagakerjaan	1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
			pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.			

**MISI 4 : MEWUJUDKAN BANDUNG NYAMAN MELALUI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu, yang terdiri dari kondisi Air, Udara, Kualitas Lahan dan Tutupan Lahan.	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKTL)$ Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	1. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2		Persentase Luasan RTH Publik dan Privat	Persentase ruang terbuka hijau Publik dan Privat terhadap luas wilayah di Kota Bandung	$\frac{\text{Luas RTH Publik dan Privat di Kota Bandung}}{\text{Luas Wilayah Kota Bandung}} \times 100\%$	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Lingkungan Hidup
3		Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Merupakan Jumlah sampah yang terkelola di Kota Bandung yang berasal dari jumlah timbulan sampah yang dikurangi dari sumber dan Jumlah Timbulan sampah yang	Jumlah Sampah yang terkelola (Jumlah Pengurangan Sampah dari sumber + Jumlah Penanganan Sampah Kota)	1. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
			ditangani/diangkut ke TPA dari total timbulan sampah seluruhnya pada tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah Sampah yang tertangani (ton)}}{\text{Jumlah/Total Timbulan Sampah (ton)}} \times 100 \%$		
4	<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Indeks <i>Livable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya khususnya pada aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur.	Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya khususnya pada aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Konversi nilai indikator ke dalam skala 0-10 berbeda-beda tergantung pada jenis data dan satuan yang digunakan. Selain itu untuk aturan konversi indikator subjektif dengan menggunakan skala Likert adalah angka 1-4. Nilai indikator yang menggunakan skala likert dihitung dengan menghitung rerata dari nilai likert yang terkumpul. Dengan demikian, nilai rerata maksimal adalah 4 dan minimal adalah 1. Cara mengonversi nilai rerata likert ke dalam skala 0-10 adalah dengan mengalikan nilai rerata likert dengan 2.5. Nilai maksimal indikator yang menggunakan data skala Likert adalah 10, dan nilai minimal adalah 2.5.	1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DPKP 2. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1. Perumda Tirtawening
		Persentase Penurunan Kemacetan	Persentase Penurunan kemacetan adalah persentase berkurangnya penyebab kemacetan pada aspek perhubungan dan non perhubungan di Kota Bandung. Suatu ruas jalan yang dikategorikan macet mempunyai sejumlah aspek	$\frac{\text{Jumlah Ruas Jalan dengan LoS pada Kategori D dan E}}{\text{Jumlah Ruas Jalan Pengamatan}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2. Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
			<p>penyebab aspek kemacetan (baik aspek perhubungan maupun nonperhubungan).</p> <p>Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngetem angkutan umum</li> <li>2. Parkir <i>On Street</i></li> <li>3. Penyeberang jalan/Gerakan pejalan kaki</li> <li>4. APILL Persimpangan</li> <li>5. Disiplin Pengemudi angkum</li> <li>6. Marka / Rambu belum ada / kurang</li> <li>7. <i>U Turn</i> Kendaraan</li> </ol> <p>Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aksesibilitas Gang / Jalan</li> <li>2. Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan</li> <li>3. Pasar Tumpah</li> <li>4. PKL</li> <li>5. Banjir / Genangan</li> <li>6. Kualitas / kondisi infrastruktur jalan</li> <li>7. Perlintasan Sebidang KA</li> <li>8. Volume lalu lintas yang tinggi</li> </ol>	<p><b>Kriteria Pelayanan Jalan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pelayanan A : Kondisi arus bebas, VCR &lt; 0,6 ; Kecepatan min. 80 km/jam; Kepadatan Sangat Rendah</li> <li>2. Tingkat Pelayanan B : Kondisi arus stabil, VCR 0,6 – 0,7 ; Kecepatan Min. 70 km/jam; Kepadatan Rendah</li> <li>3. Tingkat Pelayanan C : Kondisi arus stabil, VCR 0,7 – 0,8 ; Kecepatan Min. 60 km/jam; Kepadatan Sedang</li> <li>4. Tingkat Pelayanan D : Kondisi arus mendekati tidak stabil, VCR 0,8-0,9; Kecepatan Min. 50 km/jam; Kepadatan Sedang</li> <li>5. Tingkat Pelayanan E : Kondisi arus mendekati tidak stabil, VCR 0,9-1,0 ; Kecepatan Min. 30 km/jam; ; Kepadatan Tinggi</li> <li>6. Tingkat Pelayanan F : Kondisi arus tertahan dan terjadi antrian panjang, VCR &gt; 1,0; Kecepatan Maks 30 km/jam; Kepadatan Sangat Tinggi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> </ol>

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
5		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Perbandingan antara luas kawasan kumuh dengan luas wilayah Kota Bandung.  Kriteria penyebab kekumuhan ditinjau dari : 1. Bangunan gedung 2. Jalan Lingkungan 3. Penyediaan Air Minum 4. Drainase Lingkungan 5. Pengelolaan Air Limbah 6. Pengelolaan Persampahan 7. Proteksi Kebakaran	Perbandingan antara luas kawasan kumuh dengan luas wilayah Kota Bandung.  $\text{Persentase Luasan Kawasan Kumuh} = \frac{\text{Luas Permukiman Kumuh di Kota Bandung}}{\text{Luas Wilayah Kota Bandung}} \times 100\%$	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
6		Cakupan Pelayanan Air Minum	Jumlah Peningkatan Penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terhadap total penduduk di Kota Bandung	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Terlayani}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Bandung}} \times 100\%$	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Dinas Lingkungan Hidup	Perumda Tirta Wening
7		Persentase Penurunan Titik Genangan	Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, genangan adalah terendamnya suatu	Jumlah titik genangan dengan tinggi genangan lebih dari 30 cm dan waktu surut lebih dari 60 menit dibagi jumlah titik genangan yang harus ditangani dikali 100%	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Kecamatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
			kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.			

**MISI 5 : MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN KOTA YANG PARTISIPATIF, KOLABORATIF DAN TERINTEGRASI**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Sumber data	
					Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendukung
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Jumlah pembiayaan partisipasi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur Kota yang dibiayai dari Non-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung, antara lain APBN, APBD Provinsi, Kerjasama Daerah, KPBU, PINA, Obligasi Daerah, Tanggung Jawab Sosial, dan Lingkungan (TJSL), Sumbangan Pihak Ketiga dan Swadaya Masyarakat yang dibandingkan terhadap Total Pendapatan APBD Kota Bandung	$\frac{\text{Total Jumlah Realisasi Pembiayaan Non APBD}}{\text{Total Pendapatan APBD Kota Bandung}} \times 100\%$	1. Bappelitbang 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT  
 DAERAH KOTA BANDUNG



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
 Pejabat Tingkat I  
 NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

YANA MULYANA

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR : 050/Kep.2223-Bappelitbang/2022  
 TANGGAL : 31 Agustus 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2023**

**1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	1	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit	Sistem merit, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 2014, adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan  Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil	Akumulasi Nilai dari aspek : 1. Perencanaan Kebutuhan (Bobot 40) 2. Pengadaan (Bobot 40) 3. Pengembangan Karir (Bobot 130) 4. Promosi dan Mutasi (Bobot 40) 5. Manajemen Kinerja (Bobot 80) 6. Penggajian, Penghargaan & Disiplin (Bobot 40) 7. Perlindungan dan Pelayanan (Bobot 16) 8. Sistem Informasi (Bobot 24)	0,90	0,95	indeks	Semakin tinggi indeks penerapan sistem merit, maka semakin meningkat kualitas manajemen ASN

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Negara yang terdiri atas 8 (delapan) aspek meliputi : 1. Perencanaan Kebutuhan 2. Pengadaan 3. Pengembangan Karir 4. Promosi dan Mutasi 5. Manajemen Kinerja 6. Penggajian, Penghargaan & Disiplin 7. Perlindungan dan Pelayanan 8. Sistem Informasi	Penilaian Indeks Merit system berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah Pasal 22 ayat (2) dengan skor penilaian berdasarkan Lampiran Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019.				
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian sebagaimana Terlampir berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian sebagaimana Terlampir berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat  9 aspek standar pelayanan publik, yaitu : 1. Persyaratan;	84	85	indeks	Semakin tinggi nilai indeks survey kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian , maka semakin meningkat kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					<ul style="list-style-type: none"> <li>2. sistem mekanisme dan prosedur</li> <li>3. waktu penyelesaian;</li> <li>4. biaya/tarif;</li> <li>5. produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>6. kompetensi pelaksana;</li> <li>7. perilaku pelaksana;</li> <li>8. penanganan pengaduan, saran dan masukan dan</li> <li>9. sarana prasarana.</li> </ul>				

## 2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	1	<b><i>Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya</i></b>	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	Mengukur Tingkat Kondusifitas Kota Bandung dilihat dari Jumlah Kejadian yang berpotensi Konflik	Jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik x100%	100	100	%	Target harus 100% menunjukkan tidak boleh ada satupun konflik di Kota Bandung
	2	<b><i>Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat</i></b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mengukur Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Rekomendasi Penelitian/Survey/Kerja Praktek	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	87,00	87,25	Nilai	Semakin tinggi IKM semakin tinggi Kepuasan Masyarakat

### 3. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	1	Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	<p>Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</p> <p>Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Bapenda Kota Bandung terdiri dari 9 mata pajak</p>	Jumlah penerimaan Pajak Daerah yang dihitung secara akumulasi terhadap sembilan mata Pajak Daerah.	2.386.800.000.000	2.265.000.000.000	Rupiah	% ketercapaian = Realisasi Pajak Daerah dibagi Target Pajak Daerah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				daerah yaitu: Pajak Hotel, pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.					
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja pajak daerah	SKM pelayanan pajak daerah	NILAI IKM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara	Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas respon masyarakat penerima pelayanan pajak daerah	88,45	88,50	Nilai	Semakin tinggi nilai SKM menandakan masyarakat/ Wajib Pajak Daerah puas dengan pelayanan BAPENDA

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				<p>Pelayanan Publik dan Surat Edaran Wali Kota Bandung No. 027/SE.021-Bag. Orpad tentang pelaksanaan SKPD/unit kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.</p> <p>Instrumen pertanyaan dan akumulasi penilaiannya berdasarkan pada jawaban dari kuesioner yang disebarkan pada masyarakat/wajib pajak yang mendapatkan pelayanan pajak daerah secara tatap muka pada 10 loket pelayanan yang tersebar pada 5</p>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				lokasi UPTD PPD Bapenda Kota Bandung wilayah Utara, Barat, Selatan, Tengah dan Timur serta loket pelayanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan, BPHTB, Pajak Reklame dan PAT dan PBB di Kantor Utama Bapenda Kota Bandung, serta pengisian kuesioner oleh wajib pajak yang mendapatkan pelayanan secara <i>on line</i> pada aplikasi e-satria. Pemberian kuesioner dilakukan secara acak ( <i>random sampling</i> ) kepada					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				penerima pelayanan pajak daerah di 11 titik pelayanan (tatap muka dan <i>online</i> ).					

#### 4. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>	1	TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rata-rata kepatuhan pengelolaan keuangan	Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta peratanggungjawaban pelaksanaan APBD. Berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,	Indikator kinerja Rata-rata kepatuhan pengelolaan keuangan daerah ditargetkan dalam bentuk persentase. Target (persentase) tersebut tercapai jika unsur-unsur pengelolaan keuangan terpenuhi, yaitu:  1. Ketepatan waktu penyusunan/ penyampaian RAPBD/RAPBDP dengan formulasi pengukuran: Untuk Penyusunan RAPBD maksimal 60 hari kerja sejak ditandatanganinya KUA /PPA sampai Raperda tentang APBD disampaikan kepada DPRD, sedangkan untuk Penyusunan RAPBDP maksimal 30 hari kerja sejak ditandatanganinya KUA/PPA perubahan sampai Raperda tentang Perubahan APBD disampaikan kepada DPRD.	100	100	%	Jadwal penyusunan APBD sebagaimana tahapan penyusunan RAPBD yang tertuang pada Permendagri 27 Tahun 2021 bahwa penyampaian RAPBD mempunyai target waktu selama 60 hari kerja, sedangkan RAPBD-P mempunyai target waktu 30 hari kerja. Penyusunan/ penyampaian RAPBD/RAPBD-P kepada DPRD lebih cepat lebih baik karena dapat mendukung penetapan APBD tepat waktu.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>2. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan formulasi pengukuran: Jumlah penerbitan SP2D yang diterbitkan maksimal 2 hari kerja sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah pengajuan SPM yang diterima secara lengkap dan benar dikali 100%</p> <p>3. Tersusunnya laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu sesuai ketentuan Formulasi pengukuran:  Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu (14 dokumen laporan) terdiri dari 12 laporan keuangan hasil rekonsiliasi dengan perangkat daerah yang didasarkan pada kewajiban setiap Pemerintah Daerah untuk melaporkan laporan setiap bulan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p>				

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
					sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.07/2017; 1 (satu) Laporan semesteran tahun berjalan; dan 1 (satu) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.				
	2	TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Kepatuhan pengelolaan aset daerah	Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 bahwa pejabat penatausahaan barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pada Pasal 11 mengamanatkan bahwa Pejabat penatausahaan barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengamankan dan	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN.  Formulasi pengukuran:  Luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/bersertifikat dari BPN dibagi Jumlah Luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung (awal periode Renstra) dikali 100%	27	30	%	Luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/bersertifikat dari BPN merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi pengelolaan BMD yang mencakup seluruh kegiatan pengamanan (secara administrasi maupun fisik), penatausahaan/pelaporan BMD, dan kegiatan pengelolaan BMD lainnya.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Memperhatikan Peraturan Pemerintah tersebut pengamanan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pemanfaatan aset daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan terhadap aset milik daerah meliputi pengamanan fisik;					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi																									
						2022	2023																											
				pengamanan administratif;																														
	3	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bernilai Baik	NILAI IKM Diperoleh berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat, instrumen pertanyaan dan akumulasi penilaiannya menggunakan aplikasi E-SKM. Survei IKM dilaksanakan pada Bidang Perbendaharaan (pelayanan SP2D) dan Bidang Inventarisasi BMD (Pelayanan sewa tanah), hasil survei diinput kembali kedalam sistem E-SKM sehingga diakumulasikan	Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap semester melalui Aplikasi E-SKM. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).	85.50	85.60	Nilai	Semakin meningkatnya nilai IKM, menunjukkan semakin meningkatnya kepuasan pengguna pelayanan BKAD.																									
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Internal (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (x)</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-2,5996</td> <td>25,00-64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60-3,064</td> <td>65,00-76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644-3,532</td> <td>76,61-88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324-4,00</td> <td>88,31-100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Internal (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik	2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik	4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik				
Nilai Persepsi	Nilai Internal (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																														
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik																														
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik																														
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik																														
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik																														

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				secara otomatis untuk menggambarkan nilai capaian IKM BKAD.					

**5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain: <b>1. Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja.</b> Mengukur dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan	<b>Perencanaan Kinerja</b> dengan Bobot (30%) terdiri dari: a. Sub Komponen 1 Keberadaan (6%) b. Sub Komponen 2 Kualitas (9%) c. Sub Komponen 3 Pemanfaatan (15%)  <b>Pengukuran Kinerja</b> dengan Bobot (30%) terdiri dari: a. Sub Komponen 1 Keberadaan (6%) b. Sub Komponen 2 Kualitas (9%) c. Sub Komponen 3 Pemanfaatan (15%)	44,12	44,20	Poin	Semakin tinggal nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, maka akan semakin tinggi akuntabilitas kinerja.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</p> <p><b>2. Penilaian Pengukuran Kinerja.</b> Mengukur mulai dari indicator kinerja secara berjenjang, validitas data kinerja serta pengembangan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi</p>					
			Persentase Hasil Kajian yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	Rekomendasi yang dimanfaatkan adalah hasil kajian/penelitian yang dicantumkan sebagai bagian dari substansi pada	(Jumlah dokumen yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan /Jumlah seluruh dokumen kajian) x 100%	100	100	Persen	Jika hasil kajian Penelitian dan Pengembangan dimanfaatkan sebagai dasar perumusan

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				rancangan/rumusan kebijakan kepala daerah atau kepala perangkat daerah					kebijakan, maka hasil kajian semakin efektif
	3.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik	Indeks Pelayanan Publik yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Bappelitbang adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat	NRR per Responden = $\frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$ NRR tertimbang per unsur = $\frac{\text{NRR per Responden}}{12}$ Nilai indeks = $\frac{\text{Jumlah NRR tertimbang per unsur}}{4}$ <b>IKM Pelayanan = Nilai Indeks x (100% : 4 indeks)</b>	84,00	85,00	Poin	Survei dilakukan terhadap ±150 responden dengan 9 unsur nilai pelayanan yang harus dinilai dengan 4 indeks penilaian yang sudah dirancang. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, Jika Nilai IKM Perangkat Daerah sama dengan atau lebih dari 85 maka masuk ke

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				dengan instrumen pertanyaan dan akumulasi penilaiannya berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.					dalam kategori baik.

**6. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b>	1	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	Indeks Baca Masyarakat	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Minat baca seseorang dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi pada seseorang terhadap sumber bacaan tertentu (Sutarno, 2006).</p> <p>Budaya baca tercipta karena adanya kebiasaan membaca, sedangkan kebiasaan membaca terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan</p>	<p>Pengukuran indeks baca masyarakat berdasarkan pada 3 kriteria, yaitu :</p> <p>(X1) Ketersediaan Fasilitas Membaca, (X2) Tingkat Pemanfaatan Sumber Bahan Bacaan, (X3) Kebiasaan Membaca Masyarakat</p> <p>Indeks Baca Ma: <math>\frac{X1 + X2 + X3}{3}</math></p>	76.04	77.02	Nilai	Semakin tinggi Indeks Baca Masyarakat, maka semakin meningkat penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan perpustakaan, serta pembinaan budaya gemar pada masyarakat sesuai NSPK bidang Perpustakaan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				yang baik, menarik, memadai, baik jenis, jumlah maupun mutunya.					
	2	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkuntan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan, Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Kegiatan pengawasan kearsipan dilaksanakan dalam upaya untuk menyelamatkan arsip sehingga perlu mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangundangan.	Nilai Pengawasan Kearsipan Berdasarkan Perka ANRI No. 6 Tahun 2019	67.80	70.80	Nilai	Semakin tinggi nilai pengawasan kearsipan, maka semakin meningkat penyelenggaraan kearsipan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan yang berlaku

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
	3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Permenpan No. 14. Tahun 2017	83.75	84	Nilai	Semakin tinggi nilai indeks kepuasan masyarakat, maka semakin meningkat penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal layanan kearsipan dan perpustakaan

**7. DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG**

Dinas/ Badan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUK SI DAN TATA RUANG</b>	1	Meningkatn ya Kepatuhan Pembangun an Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Tingkat Kepatuhan Pembangun an Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Tingkat kepatuhan dokumen Rencana Teknis Terhadap Standar Teknis Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung yang Meliputi Ketentuan Tata bangunan, Keandalan Bangunan Gedung, Ketentuan Bangunan Gedung diatas dan/atau di dalam tanah, dan/atau air Serta Ketentuan desain Prototipe/purwar upa	Jumlah Obyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terverifikasi sesuai Standar Teknis  ----- ----- x100  Jumlah Seluruh Obyek Persetujua n Bangunan Gedung (PBG) yang Terdaftar sesuai Persyarata n.	60	65	%	Semakin tinggi presentasinya, berarti pemahaman masyarakat/Pem ohon terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan atas pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) semakin meningkat.

Dinas/ Badan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Indikator Hasil Pengukuran SKM terhadap Layanan pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung	Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85	86	point	Semakin tinggi point maka Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Dinas Cipta Bintar semakin meningkat.

### 8. DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>	1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana dan Kebakaran	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Penjelasan Umum disebutkan bahwa kebakaran yang termasuk ke dalam kategori bencana adalah kebakaran hutan/lahan. Kejadian kebakaran di Kota Bandung yang ditangani oleh Diskar PB adalah kejadian kebakaran di wilayah permukiman/bangunan gedung sehingga perlu dibuat indikator dan kriteria yang mencerminkan terpenuhinya pelayanan dasar trantibum linmas sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana berdasarkan NSPK tersebut.</p> <p>Kelurahan Tangguh Bencana adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB</p>	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana dan Kebakaran dibagi Jumlah Kelurahan di Kota Bandung x 100%	59,60	100	%	Semakin tinggi persentase Kelurahan Tangguh Bencana dan Kebakaran maka semakin tinggi kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana alam, zoonosis, dan kebakaran sehingga kualitas pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana di Kota Bandung pun semakin tinggi

Dinas/ Badan (Perangk at Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi	
						2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				<p>No. 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana).</p> <p>Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan an penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan atau nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>Kelurahan Siaga Kebakaran adalah wujud nyata aktivitas masyarakat yang secara aktif dan sadar berkemampuan dan memiliki keinginan untuk melakukan penanggulangan kebakaran dini sebagai implementasi dari pengaturan Manajemen Proteksi kebakaran di perkotaan dimaksud bertujuan untuk mewujudkan kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta dinas</p>						

Dinas/ Badan (Perangk at Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>terkait dalam mencegah, dan menanggulangi bahaya kebakaran, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.</p> <p>Kriteria Kelurahan Tangguh Bencana dan Kebakaran Kota Bandung merupakan gabungan dari kriteria Kelurahan Tangguh Bencana Pratama dan dan Kelurahan Siaga Kebakaran, yaitu sebagai berikut:</p> <p>1. Tangguh Bencana Kelompok Pratama (Skor 20-35) berdasarkan Perka BNPB No.1 Th. 2012, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Legislasi (adanya Dokumen KRB)</li> <li>b. Adanya Perencanaan (penyusunan dokumen Rencana Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Kontijensi [SOP])</li> <li>c. Adanya kelembagaan (Pos/Sekretariat, Forum Pengurangan Risiko Bencana, dll)</li> </ol>					

Dinas/ Badan (Perangk at Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>d. Adanya Pendanaan (APBD atau Swadaya Masyarakat)</p> <p>e. Adanya Pengembangan Kapasitas (Pelatihan Mitigasi Bencana, Sosialisasi/Penyuluhan Informasi Kebencanaan)</p> <p>f. Adanya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (di antaranya: sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan)</p> <p>2. Siaga Kebakaran, yaitu:</p> <p>a. Adanya Organisasi Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar)</p> <p>b. Adanya SOP</p> <p>c. Adanya Pos/Sekretariat</p> <p>d. Adanya Alat Proteksi Kebakaran Lingkungan</p> <p>e. Program Kerja (Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan/Sosialisasi dan Laporan Potensi Rawan Kebakaran dan Bencana lainnya)</p> <p>Lokus indikator ini mengikuti Surat Keputusan Kadiskar PB Nomor HM.03.03/1528-Diskar PB, Bulan Januari 2019 tentang Kelurahan</p>					

Dinas/ Badan (Perangk at Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana Tahun 2019-2023 karena Kelurahan Siaga Kebakaran sudah lebih dahulu ditetapkan dan sedang berjalan.					
			Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Penjelasan Umum disebutkan bahwa kebakaran yang termasuk ke dalam kategori bencana adalah kebakaran hutan/lahan. Kejadian kebakaran di Kota Bandung yang ditangani oleh Diskar PB adalah kejadian kebakaran di wilayah permukiman/bangunan gedung sehingga perlu dibuat indikator yang mencerminkan terpenuhinya pelayanan dasar trantibum linmas sub urusan kebakaran, melalui Indikator persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ini	Jumlah pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Diskar PB dibagi Jumlah kasus kebakaran di Kota Bandung dikali 100%	100	100	%	Semakin tinggi persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran semakin tinggi kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Bandung.

Dinas/ Badan (Perangk at Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengn tingkat waktu tangga (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan, dan evakuasi (Lampiran Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota)</p> <p>Korban Kebakaran terdiri dari korban jiwa dan korban harta benda. Korban Jiwa yaitu yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan atau mengalami trauma, serta dampak sosial, baik Korban Jiwa Langsung maupun Korban Jiwa Terdampak.</p>					

Dinas/ Badan (Perangk at Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>Korban Harta Benda adalah harta benda yang meliputi musnah dan/atau rusak, dampak ekonomi, dan kerusakan.</p> <p>Kriteria penerima pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban adalah setiap warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran (Pasal 6)</p>					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Berdasarkan Permenpan Nomor 16/PER/M.PAN/7/2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan dengan melakukan survei, analisis dan pemetaan terhadap kinerja pelayanan/persepsi harapan masyarakat Kota Bandung terhadap pelayanan publik sub</p>	Nilai hasil survey	84.50	85.00	Nilai	Semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat maka semakin tinggi kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana.

Dinas/ Badan (Perangk at Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				urusan kebakaran dan sub urusan bencana.					

**9. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	1	Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan adalah jumlah orang yang melakukan aktivitas wisata (rekreasi, bisnis, dan/atau memenuhi kebutuhan khusus ( <i>special interest, refreshing</i> ) baik dalam kategori berkunjung 24 jam maupun kurang dari 24 jam.  Kategori wisatawan yang dihitung adalah sebagai berikut: Wisatawan: Berkunjung dengan tujuan rekreasi / wisata dan menginap di akomodasi lebih dari 24 jam Pengunjung: Berkunjung melakukan aktivitas pengembangan diri (bukan pendidikan), bisnis, MICE lebih dari	Jumlah kunjungan wisatawan = Jumlah wisatawan melalui pintu kedatangan bandara husein sastranegara + Jumlah wisatawan melalui pintu kedatangan stasiun kereta api bandung dan kiaracondong + jumlah wisatawan melalui pintu tol	3.792.239	3.939.489	Orang	Semakin banyak wisatawan masuk ke Kota Bandung mengindikasikan keramaian/ramainya aktivitas wisata yang dilakukan wisatawan di Kota Bandung.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				24 jam dan menginap di akomodasi  Pelancong: Berkunjung melakukan aktivitas wisata kurang dari 24 jam dan tidak menginap (misal special interest berbelanja, dan kuliner)					
	2	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	Indeks Ekosistem Ekonomi Kreatif	Indeks Ekosistem Ekonomi Kreatif merupakan gambaran dari kondisi ekosistem/rantai ekonomi kreatif suatu daerah atau wilayah. Kondisi ekosistem ekonomi kreatif direpresentasikan melalui 4 dimensi (pengembangan SDM, karya/produk ekraf, penelitian dan pengembangan ekraf, dan pasar ekraf) dan 10 indikator sebagai berikut:	Indeks Ekosistem Kreatif diukur dengan metode rata-rata indikator. IEEK = Jumlah rata-rata indikator tiap dimensi : Jumlah dimensi	56,4	57	Poin	Indeks Ekosistem Ekonomi Kreatif menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi kreatif. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin pertumbuhan positif di sektor ekonomi kreatif

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budaya, rekreasi, dan pariwisata</li> <li>2. Pekerjaan dan luaran kreatif</li> <li>3. Modal dan partisipasi budaya</li> <li>4. Tempat, sumber daya dan fasilitas</li> <li>5. SDM, talenta, dan pendidikan</li> <li>2. Pemerintah dan regulasi</li> <li>3. Kewirausahaan</li> <li>4. Teknologi dan TIK</li> <li>5. Transportasi dan aksesibilitas</li> <li>6. Aktivitas bisnis dan ekonomi</li> </ol>					
	3	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang tidak hanya bertahan namun juga dinamis mewarnai pembangunan peradaban. Indeks	Indeks Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui pengukuran 7 dimensi (terdiri 31 indikator) dengan mencari metode rata-rata Nilai dimensi 1...7 : 7	51,20	51,53	Poin	Semakin tinggi nilai rerata 7 dimensi pembangunan kebudayaan, maka semakin tinggi/positif pemajuan kebudayaan daerah.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Pembangunan Kebudayaan juga dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan pembangunan kebudayaan yang <i>knowledge-based</i> , dan menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor pembangunan kebudayaan.	Tujuh dimensi pembangunan kebudayaan: 1. Ekonomi budaya 2. Pendidikan 3. Ketahanan Sosial Budaya 4. Warisan Budaya 5. Ekspresi Budaya 6. Budaya Literasi 7. Kesenjangan Gender				

#### 10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII</b>	1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).	NRR per Unsur =Jumlah Nilai per unsur / Jumlah Kuesioner yg terisi  NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111  Nilai indeks = Jumlah NRR tertimbang x 25	85,50	86	Nilai	mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan target setiap tahun yang harus dicapai menyesuaikan dengan target pada RPJMD. Semakin tinggi nilai maka semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	2		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah melayani masyarakat, maka diperlukan suatu alat pengukuran. Di dalam indikator ini terdapat 4 jenis dokumen yang diukur yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Keluarga</li> <li>2. KTP-EL</li> <li>3. Akta Kelahiran</li> <li>4. Akta Kematian</li> </ol> <p>Dasar Hukum : Permendagri NO. 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p>	<p>Q1= <math>(\Sigma \text{Penerbitan KK thn X} / \Sigma \text{Kepala Keluarga}) \times 100\%</math></p> <p>Q2= <math>(\Sigma \text{Pemilik KTP-EL}) / (\Sigma \text{penduduk wajib KTP-EL}) \times 100\%</math></p> <p>Q3= <math>(\Sigma \text{akta pemilik akta lahir 0-18 thn}) / (\Sigma \text{penduduk 0-18 thn}) \times 100\%</math></p> <p>Q4= <math>(\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}) / (\Sigma \text{kematian di thn X}) \times 100\%</math></p> <p><math>x = (Q1 + Q2 + Q3 + Q4) / 4</math></p> <p>Q1 adalah cakupan penerbitan kartu keluarga yaitu jumlah penerbitan Kartu Keluarga</p>	96	96,50	%	<p>Mengukur kepemilikan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Semakin tinggi capaian target maka semakin banyak penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.</p>

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					<p>sampai dengan tahun x berbanding jumlah kepala keluarga</p> <p>Q2 adalah cakupan penerbitan KTP-el jumlah pemilik KTP el berbanding jumlah wajib KTP</p> <p>Q3 adalah cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Jumlah penduduk usia 0-18 pemilik akta kelahiran berbanding penduduk usia 0-18 tahun</p> <p>Q4 adalah cakupan jumlah penerbitan akta kematian pada tahun x berbanding</p>				

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					jumlah kematian pada tahun x				
	3		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan adalah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal, maka	( $\Sigma$ Lembaga yang melakukan PKS Tertib / $\Sigma$ PKS) x 100%  PKS adalah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan  $\Sigma$ PKS adalah jumlah lembaga yang melakukan kerjasama pemanfaatan data  $\Sigma$ PKS Tertib adalah Lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan data	70	75	%	Mengukur keaktifan lembaga pengguna/OPD dalam memanfaatkan data kependudukan dimana semakin tinggi nilai maka semakin banyak OPD yang aktif memanfaatkan data kependudukan Disdukcapil

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>diperlukan suatu alat ukur.</p> <p>Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan mengukur peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan cara memberikan hak akses data kependudukan kepada lembaga/instansi terkait.</p> <p>Dasar Hukum : Permendagri NO. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan</p>					



## 11. DINAS KESEHATAN

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS KESEHATAN</b>	1	Meningkatnya kualitas Kesehatan Lingkungan, Budaya Hidup Sehat dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu (Konversi)	Kematian Perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.	Jumlah kematian ibu dikali 100.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian ibu) dibagi <b>jumlah kelahiran hidup</b> dalam 1 tahun.	88.68	86.46	Per 100.000 kelahiran hidup	
	2		Angka Kematian Bayi (Konversi)	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)	Jumlah kematian bayi usia 0-1 thn dikali 1.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian bayi) dibagi <b>jumlah kelahiran hidup</b> dalam 1 tahun	3.3	3.23	Per 1000 kelahiran hidup	
	3		Cakupan Rumah Sehat	Rumah Sehat adalah Rumah yang minimal memenuhi kriteria akses air minum, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan	Jumlah Rumah Sehat dibagi Jumlah seluruh rumah di Kota Bandung dikali 100.	76	78	%	

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				pencahayaan ( <i>Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Permenkes Nomor 1077/PER/V/Menkes/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah</i> )					
	4		Indeks Keluarga Sehat	Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja. <i>Permenkes No. 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga</i>	Jumlah Keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja x 100%	0.2	0.21	persen	
	5		Persentase Balita Gizi Buruk	Menurunnya jumlah balita wasting (BB dibandingkan TB/PB kurang dari -2 SD) dalam satu wilayah pada periode waktu tertentu	Jumlah Balita wasting dibagi jumlah seluruh balita yang dilakukan pengukuran dalam satu wilayah pada periode tertentu dikali 100	5.25	5.20	persen	

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Permenkes No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi					
	6		Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	<p>Persentase cakupan pengendalian penyakit menular (TBC), tidak menular (Hipertensi) dan Kejadian Luar Biasa</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>1. Permenkes No. 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.</p> <p>2. Dokumen Rencana Aksi Program Tahun 2020-2024, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI</p> <p>3. Perda Kota Bandung No. 01 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah.</p>	Jumlah kasus TBC, Hipertensi, dan KLB yang ditangani dibagi Jumlah kasus TBC, Hipertensi, KLB yang terjadi dikali 100	100	100	persen	

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	7		Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kategori Baik	<p>Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang diperoleh dari survei kepuasan masyarakat yang dilakukan seluruh fasilitas Kesehatan di Kota Bandung.</p> <p>Ruang Lingkup adalah seluruh faskes milih pemerintah yang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan kategori nilai rata-rata “baik” dan “sangat baik”.</p> <p>Permenpan No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	<p>Jumlah fasilitas Kesehatan yang memiliki kinerja unit pelayanan kategori “Baik” dan “Sangat baik” dari hasil survei kepuasan masyarakat dibagi jumlah seluruh faskes yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat dikali 100</p> <p>Kategori baik : 76.61-88.3</p>	90	100	persen	

## 12. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b>	1	Terpenuhinya ketersediaan pangan yang aman dan sehat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan	Skor PPH = Skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + Pangan Hewani + Minyak dan Lemak + Buah/biji Berminyak + Kacang-kacangan + Gula + Sayur dan Buah + Lain-lain	85	85.8	Angka	Skor PPH dikatakan ideal apabila nilainya mencapai 100. Semakin tinggi Skor PPH atau mendekati 100 menunjukkan konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.
		Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin	Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi	Cakupan masyarakat miskin yang pangannya tercukupi adalah masyarakat miskin yang diberi bantuan pangan melalui ATM Beras untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin.  Penentuan target didasarkan pada jumlah penerima manfaat (dari data DTKS) dari jumlah dan kapasitas	Cara pengukuran adalah:  Jumlah masyarakat miskin yang diberi bantuan pangan ekuivalen beras / Jumlah masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS x 100%	1.63	1.96	%	Semakin besar realisasi melebihi target menunjukkan jumlah masyarakat miskin yang tercukupi pangannya semakin banyak.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				ATM Beras dan Cadangan pangan ekuivalen beras.					
	3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan Aktif	Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan aktif merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha yang sudah memperoleh pemberdayaan (pelatihan/penyuluhan/pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses/penguatan kelembagaan) dan masih aktif melakukan usahanya pada saat pendataan.	Cara pengukuran adalah: Jumlah Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan aktif / Jumlah Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan binaan x100%	75.00	80.00	%	Semakin tinggi persentase pelaku usaha pertanian dan perikanan aktif menunjukkan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha bidang pertanian perikanan yang memperoleh pemberdayaan, dan/ atau semakin banyaknya masyarakat yang diberdayakan dan menjadi pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Berdasarkan Permenpan No. 16 Tahun 2014, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.</p> <p>Unsur penilaian SKM diantaranya: 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas 4. Kedisiplinan Petugas 5. Tanggung Jawab Petugas 6. Kemampuan Petugas 7. Kecapatan Pelayanan 8. Keadilan mendapatkan pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas</p> <p>Pengukuran IKM sesuai RPJMD sebelumnya kategori nilai "baik" minimal 83,00, dengan adanya perubahan RPJMD nilai IKM kategori "baik" menjadi 85,00. Target pada tahun 2021 dan 2022 masih dibawah 85,00, tetapi</p>	Total dari Nilai Persepsi per unsur x Nilai Penimbang dibagi Total unsur yang terisi	84.00	85.00	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap kinerja/pelayanan dinas

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satua n	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				realisasi akan diupayakan melebihi 85,00.					

### 13. DINAS KETENAGAKERJAAN

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS KETENAGAKERJAAN</b>	1	Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan	Presentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2014 Tentang SPM, Presentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan, adalah presentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberikerja. Semakin banyak jumlah tenagakerja yang ditempatkan akan berdampak pada menurunnya jumlah pengangguran.	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan / Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar) x 100%	45.90	46.15	%	Semakin tinggi Presentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan maka semakin banyak tenaga kerja yang ditempatkan

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
	2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, berdasarkan survey yang terdapat dalam aplikasi New Bima terhadap 11 layanan;  1. Pendaftaran uji kompetensi 2. Pemagangan kerja 3. Pelatihan Kerja 4. Pengaduan 5. Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	SKM= Total dari Nilai Presepsi Per Unsur dibanding total unsur yang terisi x Penimbang	84	85	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM maka akan semakin tinggi kepuasan masyarakat

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				6. Pendaftaran Perjanjian kerja waktu tertentu 7. Pencatatan Perselisihan dan Mediasi 8. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 9. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 10. Perizinan Bursa Kerja khusus 11. Perizinan Pemagangan Mandiri					

#### 14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e- government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Daerah;</p> <p>Pelaksanaan SPBE berdasar pada;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE</li> <li>3. Peraturan Menteri PAN-RB No.59 Tahun</li> </ol>	Level kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Kepmenpan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	3.30	3.35	Nilai	Penilaian yang dilakukan oleh Kemen PAN RB merupakan tolak ukur bagi pemerintah baik pusat maupun daerah telah sejauhmana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, semakin tinggi penilaian semakin matang dalam penyelenggaraan SPBE.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE					
	2	Meningkatnya Layanan Bandung Open Data	Persentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	Data sangat dibutuhkan baik di lingkungan pemerintahan dalam mengambil kebijakan atau keputusan maupun informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  Tingkat Kematangan layanan data berdasarkan pada;  1. Peraturan Menteri PAN-RB No.59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE 2. Data yang diperlukan dalam layanan informasi sesuai dengan Permendagri	Jumlah Data berdasarkan Permendagri No.86/2017 yang dipublikasi di Portal Data : Jumlah data yang seharusnya tersedia berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017x 100%	65	75	Persen	Kebutuhan akan data atau informasi bagi pemerintahan maupun masyarakat sangatlah penting, karena tanpa data yang jelas, akurat dan update mustahil menjadi pedoman bagi penentuan kebijakan. Demikian pula bagi masyarakat, data sangatlah penting untuk mengetahui data/informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingannya.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Nomor 86 Tahun 2017					
	3	Meningkatnya Keamanan Informasi Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	<p>Dalam sistem pemerintahan, persandian memiliki peran yang amat vital dalam mengamankan informasi yang harus dijaga tingkat keamanannya.</p> <p>Untuk menjaga keamanan informasi, selalu dilakukan pemeriksaan tingkat keamanan aplikasi pada perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung</p> <p>Tingkat Kematangan Keamanan Persandian berdasarkan pada;</p>	Jumlah aplikasi yang aman terkendali : jumlah aplikasi yang di audit x 100%	93.75	100	Persen	<p>Aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah yang aman dan terkendali, sangatlah penting karena aplikasi informasi yang bersih dari berbagai kerawanan, sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap aplikasi-aplikasi layanan publik.</p> <p>Layanan berupa pengujian kerentanan, pemberian saran dan rekomendasi terkait pengamanan, guna mengurangi celah kerentanan yang terdapat pada sistem elektronik pemerintah, dengan tujuan;</p> <p>a) Mengidentifikasi kerentanan dan tingkat</p>

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>1. Peraturan Menteri PAN-RB No.59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE</p> <p>2. Layanan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.</p>					<p>risiko yang dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal atau internal untuk melanggar kebijakan keamanan atau menyebabkan kerusakan terhadap sistem informasi;</p> <p>b) Mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden.</p> <p>c) Mengeksploitasi kerentanan dan memberikan bukti dari konsep terhadap kerentanan yang dapat dieksploitasi.</p> <p>d) Melindungi data dan informasi berklasifikasi rahasia;</p>

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
									<p>e) Menjaga reputasi stakeholder;</p> <p>f) Melindungi ketersediaan, keutuhan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut (UU ITE).</p>
	4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Penilaian IKM berdasarkan Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Berdasarkan hasil survai pelayanan Diskominfo terhadap masyarakat	85	88.31	Nilai	<p>Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public.</p> <p>Tujuan diselenggarakannya IKM untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan</p>

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
									<p>publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan public secara periodik</p> <p>Unsur survey kepuasan masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur</li> <li>3. Waktu penyelesaian</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6. Kompetensi pelaksana</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>

**15. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DINAS/ BADAN (PERANGKAT DAERAH)	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET		SATUAN	INTERPRETASI
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
DINAS KOPERASI DAN UKM	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM	Indeks Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan UKM merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM.	SKM = Total Nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang  Interpretasi terhadap penilaian SKM = SKM unit pelayanan x 25	83,50	85	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan public terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan public.  Survey kepuasan masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan public dan untuk

DINAS/ BADAN (PERANGKAT DAERAH)	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET		SATUAN	INTERPRETASI
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
									<p>mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan public secara periodik.</p> <p>Unsur survey kepuasan masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur</li> <li>3. waktu penyelesaian</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk/ spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6. kompetensi pelaksana</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>

DINAS/ BADAN (PERANGKAT DAERAH)	NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET		SATUAN	INTERPRETASI
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT, meningkatkan asset dan omset Koperasi (Permendagri 18 Tahun 2020 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah)	Jumlah Koperasi berkualitas sesuai kriteria dibagi jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT x 100	9,93	10,64	%	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT, meningkatkan asset dan omset koperasi (Permendagri 18 Tahun 2020 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggara pemerintah daerah)
	3	Meningkatnya Usaha Mikro yang omset dan atau kemampuan usahanya meningkat	Persentase Usaha Mikro yang omset dan atau kemampuan usahanya meningkat	Usaha Mikro yang omset dan atau kemampuan usahanya meningkat adalah Usaha mikro yang mengalami peningkatan omset setelah dilakukan pendampingan dan pemberdayaan melalui bimtek, fasilitasi promosi, kemitraan, pemasaran dan permodalan	(Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya ditambah jumlah UNF yang meningkat kemampuan usahanya) dibagi (jumlah usaha mikro yang terdaftar pada data base ditambah jumlah UNF terdaftar yang ada di 18 lokasi penataan) x 100	4,08	4,29	%	Usaha Mikro yang omset dan atau kemampuan usahanya meningkat adalah Usaha mikro yang mengalami peningkatan omset setelah dilakukan pendampingan dan pemberdayaan melalui bimtek, fasilitasi promosi, kemitraan, pemasaran dan permodalan.

## 16. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas / Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut untuk daerah yang memiliki wilayah laut.</p> <p>Penggunaan indikator IKLH ini diwajibkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan</p>	51,71	51,79	Poin	<p><b>Kategori IKLH :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat Baik <math>90 \leq x \leq 100</math></li> <li>• Baik <math>70 \leq x &lt; 90</math></li> <li>• Sedang <math>50 \leq x &lt; 70</math></li> <li>• Kurang <math>25 \leq x &lt; 50</math></li> <li>• Sangat Kurang <math>0 \leq x &lt; 25</math></li> </ul>

Dinas / Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.				
	3.		Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	<b>Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah =</b> Capaian penanganan sampah + Capaian pengurangan sampah.	Cakupan layanan pengelolaan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu.	98,70	99,00	Persen	Semakin besar nilai Cakupan Pengelolaan Sampah Kota semakin baik karena targetnya adalah seluruh sampah terkelola (100%), baik melalui pengurangan sampah sejak dari sumber maupun yang diangkut ke TPA

Dinas / Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p><b>Capaian Pengurangan Sampah =</b> (Jumlah tonase sampah yang diolah di sumber sampah per tahun/Jumlah tonase sampah kota per tahun) x 100%</p> <p><b>Capaian Penanganan Sampah =</b> (Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA per tahun/Jumlah tonase sampah kota per tahun) x 100%</p>	<p>Capaian Pengurangan Sampah menunjukkan besarnya sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber sampah oleh masyarakat. Semakin tinggi capaiannya, secara tidak langsung telah menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat di dalam melakukan pengelolaan sampah, menuju ke arah yang lebih baik.</p> <p>Capaian Penanganan Sampah menunjukkan seberapa banyak sampah kota yang ditangani oleh pemerintah sehingga kebersihan kota dapat tetap terjaga. Apabila tidak ditangani akan bermuara pada pembuangan sampah ke sungai atau selokan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.</p>				

**17. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh DP3A.</p> <p>IKM DP3A menunjukkan kinerja DP3A dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari DP3A. Survey yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur</p>	<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.</p> <p>Responden dipilih acak, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 100 orang dari jumlah populasi penerima pelayanan, dengan dasar (Jumlah Unsur + 1) x 10 = Jumlah Responden (9 + 1) x 10 = 100 responden.</p> <p>IKM Unit Pelayanan = Nilai Indeks x 25</p> <p>Kriteria:                      Nilai Indeks = jumlah dari NRR                      Tertimbang Per Unsur</p>	87,80	89,40	Persen	-

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.	<p>NRR Tertimbang Per Unsur = NRR Per Unsur x 0.111</p> <p>NRR (Nilai Rata Rata) = Jumlah Nilai Perunsur / Total Responden</p> <p>Jumlah Nilai Per Unsur = Setiap jawaban responden memiliki nilai setiap pertanyaannya, maka pada Jumlah Nilai Per Unsur adalah jumlah dari nilai tersebut.</p>				
	2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.	Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 klaster KLA, yaitu: I. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator: (1) Peraturan Daerah Tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan	90,62	100,00	Persen	-

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					<p>KLA; (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.</p> <p>II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator: (4) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (6) pelembagaan partisipasi Anak.</p> <p>III. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator; (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuh Anak bagi orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif</p>				

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					<p>(PAUD-HI); (10) standardisasi lembaga pengasuhan alternative; dan (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.</p> <p>IV. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator; (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat; dan (17) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) rokok.</p> <p>V. Klaster pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator; (18)</p>				

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					<p>wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.</p> <p>VI. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator; (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok</p>				

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					<p>minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.</p> <p>Klaster I, II, III, dan IV merupakan cakupan Pemenuhan Hak Anak, dan Klaster V merupakan cakupan Perlindungan Khusus Anak.</p> <p><i>Kelurahan Layak Anak / Jumlah Kelurahan di Kota Bandung x 100%</i></p>				

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Berdasarkan permen PPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 446), Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 320), Permen PPPA No. 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1154), dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan	Puspel PP aktif yaitu : 1. Sudah terdapat Pengurus minimal 3 Orang dibuktikan dengan adanya SK 2. Sudah mempunyai Rencana Kerja Tahunan 3. Sudah mempunyai tempat/ruangan untuk melayani pengaduan 4. Sudah Membuat Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan 5. 60% dari rencana kerja sudah dikerjakan  <i>Jumlah Puspel PP aktif / Jumlah Puspel PP di Kota Bandung x 100%</i>	23,18	46,36	Persen	-

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi	
						2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				<p>di Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.</p> <p>Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat PUPEL PP adalah Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komperhensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitas sosial,</p>						

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.					

### 18. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	1	Meningkatn ya Budaya Berolahraga	Indeks Pembangun an Olahraga (IPO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pembangunan Olahraga, yang selanjutnya disebut IPO adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan sembilan dimensi dasar yaitu: sumberdaya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.</li> <li>• Indeks Pembangunan Olahraga di Kota Bandung memiliki target populasi yaitu 30 Kecamatan</li> <li>• dasar pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga tertuang pada buku pedoman pelaksanaan pengukuran IPO Kemenpora RI tahun 2021</li> </ul>	Pengukuran IPO melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literasi Fisik &gt; Skala/angket</li> <li>2. Partisipasi &gt; Skala/angket</li> <li>3. Perkembangan Personal &gt; Skala/angket</li> <li>4. Kesehatan &gt; Skala/angket</li> <li>5. Ekonomi &gt; Skala/angket</li> <li>6. Ruang Terbuka &gt; Format isian terbuka</li> <li>7. SDM Olahraga &gt; Format isian terbuka</li> <li>8. Performa &gt; Format isian terbuka</li> <li>9. Kebugaran &gt; Tes lapangan (MFT)</li> </ol>	0.373	0.382	Indeks	Meningkatnya nilai IPO mencerminkan suatu keberhasilan pembangunan olahraga melalui Aspek SDM, Partisipasi, Kebugaran Jasmani dan Sarana dan Prasarana

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda Aktif Positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria Organisasi Pemuda yang aktif Menurut UU Kepemudaan No 40 Tahun 2009 memiliki:               <ol style="list-style-type: none"> <li>keanggotaan;</li> <li>kepengurusan;</li> <li>tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan</li> <li>anggaran dasar dan anggaran rumah tangga</li> </ol> </li> <li>Jumlah seluruh organisasi yaitu 98 organisasi Kepemudaan</li> <li>peraturan yang mengatur tentang formulasi pengukuran yaitu Permendagri No 86 Tahun 2017.</li> </ul>	<i>Jumlah Organisasi Yang Aktif Positif</i> <i>Jumlah Organisasi Kepemudaan</i>	75.51	100	Persentase	Semakin tinggi persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan, itu menandakan semakin banyaknya organisasi yang terbina
	3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berupa angka.</li> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan disusun</li> </ul>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat IKM terhadap layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	84	85	Indeks	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan, menunjukkan

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan sebagai pengguna layanan agar Dispora dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik					tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan semakin baik

**19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKU)	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mengacu Permenpan RB No.14 Tahun 2017	Perhitungan IKM berdasarkan PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	83,50	85	Nilai	NILAI IKM Diperoleh berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat , instrumen pertanyaan dan akumulasi penilaiannya menggunakan aplikasi dpmpptsp.bandung.go.id setiap pelaku usaha yang datang mengurus ke ruang layanan penanaman modal diwajibkan melakukan pengisian survei sehingga muncul nilai hasil Survei yang bisa diakumulasikan secara otomatis untuk menggambarkan nilai capaian IKM Perangkat Daerah atau Bidang Masing-masing. Evidence Indikator ini berupa lembar hasil penilaian dan rekap capaian Nilai IKM pada aplikasi dpmpptsp.bandung.go.id pada aplikasi Indikator ini tercapai bila Nilai IKM Akumulasi satu Perangkat Daerah tercapai sesuai target yang telah ditentukan, didalam pelaksanaannya Indikator ini memperhatikan beberapa aturan hukum diantaranya Berdasarkan Permenpan RB No. 14

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
									Tahun 2017, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Pada Indikator Kinerja Ini dimaksudkan untuk mengetahui Kumulasi total Nilai IKM atas pelayanan pada setiap Bidang perizinan melalui aplikasi <a href="http://dpmptsp.bandung.go.id">dpmptsp.bandung.go.id</a>
	2	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMDN dan PMA LKPM	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dilaporkan pelaku usaha dalam Sistem LKPM online dan telah diverifikasi dan diterbitkan oleh BKPM dan DPMPTSP Propinsi Jawa Barat	Nilai investasi dihitung berdasarkan data dari LKPM yang diterbitkan Provinsi Jawa Barat dari Rekapitulasi (Total) PMDN dan PMA	6,65	7,25	Triliun Rupiah	Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian nilai realisasi investasi setiap triwulan yang pelaporannya disampaikan oleh pelaku usaha melalui <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> (menu Pelaporan - Laporan LKPM)

## 20. DINAS PENDIDIKAN

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.	$APK\ PAUD = \left( \frac{\text{Siswa PAUD}}{\text{Penduduk usia PAUD}} \right) \times 100\%$  $APK\ SD = \left( \frac{\text{Siswa SD}}{\text{Penduduk usia SD}} \right) \times 100\%$  $APK\ SMP = \left( \frac{\text{Siswa SMP}}{\text{Penduduk usia SMP}} \right) \times 100\%$	92,77	92,86	%	Semakin tinggi nilai APK, maka semakin meningkat aksesibilitas terhadap pendidikan usia dini, dasar dan menengah pertama
	2	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Kelompok umur SD adalah 7-12 Tahun, dan Kelompok umur SMP adalah 13-15 Tahun.	$APM\ SD = \left( \frac{\text{Siswa usia SD}}{\text{Penduduk usia SD}} \right) \times 100\%$  $APM\ SMP = \left( \frac{\text{Siswa usia SMP}}{\text{Penduduk usia SMP}} \right) \times 100\%$	90,17	90,23	%	Semakin tinggi nilai APM, maka semakin meningkat aksesibilitas terhadap pendidikan usia dini, dasar dan menengah pertama

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Angka kelulusan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada tiap jenjang pendidikan pada tahun sebelumnya.	Angka Kelulusan = Jumlah lulusan pada jenjang Pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat tertentu x 100%  $\text{Persentase AL} = \frac{JL}{JL2} \times 100$ JL: Jumlah Siswa JL2: Jumlah Siswa tahun sebelumnya	100	100	%	Angka kelulusan 100% menunjukkan terwujudnya Mutu Pembelajaran
	4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas	Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot/ Jumlah	85,05	85,10	Poin	Semakin meningkatnya IKM, menunjukkan meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				pelayanan publik selanjutnya.	UnsurIKM: (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbangan				

**21. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	1	Meningkatny a Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	Berdasarkan Surat BKKBN Nomor 833/TU.302/D4/202 0 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Klasifikasi Kampung KB, yang menjadi kriteria penilaian klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas adalah : 1. Indikator Kelengkapan Kepengurusan 2. Ketersediaan Sarana Prasarana 3. Sumber Dana 4. Kegiatan Operasional 5. Keterlibatan Lintas Sektoral 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TIK)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, mandiri dan berkembang dibagi Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas dikali 100%	38,10	39,68	%	Semakin tinggi Persentase Kampung KB, maka semakin meningkat Jumlah Kampung KB Aktif yang Paripurna, Mandiri dan Berkembang.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				7. Dampak Program dan Inovasi					
	2	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana	$TFR = 5 \sum_{i=1}^{i=7} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total  ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur  bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i  pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama  i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok umur 45-49)  K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>	2,00	2,00	%	Semakin Menurun TFR, maka semakin berhasil tingkat pencapaian Angka Minimum Kelahiran

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah					
	3	Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Kembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Infomasi Keluarga Pasal 52 yang berbunyi, "Pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan Pendataan Keluarga." Pasal 53	Rumus : $Skor D = \sum_{i=1}^k X_i$ Keterangan: D : dimensi (ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan) X : skor masing masing variabel dalam setiap dimensi I : variabel pada setiap dimensi k : jumlah variabel pada setiap dimensi  <i>Indeks Ketentraman =</i>	52,62	53,12	Indeks	Semakin Tinggi Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga), maka semakin berhasil pembangunan keluarga.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				<p>Pasal (1) berbunyi, "Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabk an melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Pasal (2) Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan</p>	<p><i>Skor Total</i> <i>Ketentrangan- Min Skor</i> <i>Ketentrangan x 100</i> <i>Maks Skor</i> <i>Ketentrangan- Min Skor</i> <i>Ketentrangan</i></p> <p><i>Indeks Kemandirian =</i> <i>Skor Total Kemandirian</i> <i>- Min Skor Kemandirian</i> <i>x 100</i> <i>Maks Skor Kemandirian</i> <i>- Min Skor Kemandirian</i></p> <p><i>Indeks Kebahagiaan =</i> <i>Skor Total</i> <i>Kebahagiaan- Min Skor</i> <i>Kebahagiaan x 100</i> <i>Maks Skor</i> <i>Kebahagiaan- Min Skor</i> <i>Kebahagiaan</i></p> <p><i>iBangga =</i> <i>Indeks Ketentrangan +</i> <i>Indeks Kemandirian +</i> <i>Indeks Kebahagiaan</i></p>				

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana. Dan Peraturan BKKBN Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga. Sehingga dihasilkan data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) tentang Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bandung					
	4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot dibagi Jumlah Unsur	82	83	poin	Semakin tinggi nilai IKM, maka semakin baik persepsi masyarakat atas kinerja

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
		Publik yang Prima		Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).	IKM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang				pelayanan publik pada Perangkat Daerah.

## 22. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).	Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot dibagi Jumlah Unsur  IKM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	85	86	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, maka semakin baik persepsi masyarakat atas kinerja pelayanan publik pada Perangkat Daerah.
	2	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Indonesia sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor	Nilai ekspor tahun berkenaan dikurangi nilai ekspor tahun sebelumnya dibagi nilai	0,3	0,3	%	- Nilai ekspor dihitung berdasarkan nilai ekspor Kota Bandung baik dari penerbitan Surat Keterangan Asal maupun non

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia ( <i>Rules Of Origin Of Indonesia</i> ) dan ketentuan penerbitan Dokumen keterangan Asal untuk barang Asal Indonesia dalam ASEAN <i>Trade in Goods Agreement</i> (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)	ekspor tahun sebelumnya				Surat Keterangan Asal dengan menggunakan satuan nilai USD - Nilai ekspor merupakan besaran nilai dari komoditi Kota Bandung yang diperdagangkan ke luar negeri
			Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pelaku Usaha perdagangan berdaya saing merupakan pelaku usaha perdagangan yang memenuhi 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria : 8. Mempunyai legalias usaha; 9. Omzet meningkat; 10. Bermitra ( <i>offline/online</i> ); 11. Mempunyai standarisasi.	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang memiliki daya saing dibagi total pelaku usaha perdagangan dikali 100%	79,56	83,33	%	Pelaku Usaha perdagangan berdaya saing merupakan pelaku usaha perdagangan yang memenuhi 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria : 1. Mempunyai legalias usaha; 2. Omzet meningkat; 3. Bermitra ( <i>offline/online</i> ); 4. Mempunyai standarisasi.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
			Persentase Pelaku Industri Kecil Mengengah berdaya saing	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perindustrian	Jumlah pelaku IKM yang memiliki daya saing dibagi total pelaku IKM dikali 100%	51,61	60,14	%	Pelaku industri kecil menengah berdaya saing merupakan pelaku usaha perdagangan yang memenuhi 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria : 1. Mempunyai legalitas usaha; 2. Omzet meningkat; 3. Bermitra ( <i>offline/online</i> ); 4. Mempunyai standarisasi.
			Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan rata-rata flukuasi harga barang kebutuhan pokok merupakan rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dengan	Penjumlahan selisih harga rata-rata per bulan barang kebutuhan pokok per komoditi dan harga acuan masing-masing komoditi dibandingkan dengan harga acuan	15	15	%	- Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan rata-rata flukuasi harga barang kebutuhan pokok merupakan rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				batas toleransi 15% di atas harga acuan.	masing-masing komoditi dibagi jumlah total komoditi dikali 100%				- pokok dengan batas toleransi 15% di atas harga acuan. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok didasarkan pada hasil monitoring terhadap 8 komoditi, yaitu : beras, cabe merah, bawang merah, gula putih, minyak gorng, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

### 23. DINAS PERHUBUNGAN

Dinas/ Badan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	1	Meningkatnya Pelayanan Jalan	Persentase tingkat pelayanan jalan	Tingkat pelayanan jalan menunjukkan kondisi macet tidaknya suatu ruas jalan. Suatu ruas jalan dikategorikan macet apabila tingkat pelayanan jalannya berada di tingkat D, E ataupun F. Sedangkan sebaliknya suatu ruas jalan dikategorikan tidak macet apabila tingkat pelayanan jalannya berada di tingkat A, B atau paling rendah C. Tingkat pelayanan jalan ditentukan oleh dua variabel / syarat penilaian yang terdiri dari v/c ratio (perbandingan antara volume dan kapasitas jalan) dengan batasan maks 0,8 dan kecepatan rata-rata tempuh dengan batasan minimal 21 km/jam.	Jumlah ruas jalan dengan kategori A,B,C dibagi dengan jumlah ruas jalan pengamatan x 100%	85.22	92.17	%	Ruas Jalan dikategorikan macet apabila tingkat pelayanan jalannya ada di Level D, E dan F dan ruas jalan dikategorikan tidak macet apabila tingkat pelayanan jalannya ada di Level C, B dan A

Dinas/ Badan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai Permenpan 14 / 2017	<p>NRR per Responden = Jumlah Nilai Responden / Jumlah Responden</p> <p>NRR tertimbang per unsur = NRR per Responden / 9</p> <p>Nilai indeks = Jumlah NRR tertimbang per unsur</p> <p>IKM Pelayanan = Nilai Indeks x (100% : 4 indeks)</p>	83.5	85	Indeks	Nilai IKM dikategorikan baik apabila mempunyai minimal sebesar 76,61

**24. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	1	Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.	Luas pemukiman kumuh di Kota Bandung ----- ----- --- x 100% Luas wilayah Kota Bandung	2,76	2,16	%	Semakin rendah persentase luasan kawasan kumuh, semakin meningkat kualitas hunian permukiman, semakin berkurang Kawasan kumuh di Kota Bandung.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	2	Meningkatnya Kuantitas RTH Publik	Persentase luasan RTH publik	Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman atau area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	Luas RTH publik di Kota Bandung ----- ----- ---- x 100 % Luas wilayah Kota Bandung	6,55	6,57	%	Semakin tinggi persentase luasan RTH publik, semakin meningkat kuantitas RTH publik, semakin bertambah luas RTH publik di Kota Bandung.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Kualitas RTH Publik	Persentase luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota terpelihara	Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman atau area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	Luas RTH publik yang terpelihara ----- ----- ----- x 100% Luas RTH publik di Kota Bandung	25,78	26,02	%	Semakin tinggi persentase luasan RTH publik terpelihara, semakin meningkat kualitas RTH publik, semakin bertambah luas RTH publik terpelihara di Kota Bandung.
	4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara	Hasil Survey sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	85,50	85,55	Nilai	Semakin tinggi nilai indeks kepuasan masyarakat, semakin meningkat kualitas pelayanan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017				

**25. DINAS SOSIAL**

Dinas/ Badan (Perangk at Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS SOSIAL</b>	1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase PPKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri atas 26 jenis kriteria PPKS sesuai dengan Permensos No. 8/2012 yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dibagi populasi PPKS di Kota Bandung dikali 100%	Jumlah PPKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dibagi jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh rehabilitasi sosial dasar dikali 100%	N/A	N/A	%	
	2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu.	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar.	Jumlah keluarga miskin yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memperoleh	Jumlah warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar dibagi jumlah warga tidak mampu yang seharusnya terpenuhi sebagian	N/A	N/A	%	

Dinas/ Badan (Perangk at Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				jaminan sosial dibagi populasi keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS dikali 100%	kebutuhan dasar dikali 100%				
	3	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan.	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS).	Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat rentan seperti masyarakat miskin, lansia, anak, penyandang disabilitas, dll berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar, peranan sosial dan kemandirian ekonomi	Nilai akumulasi indeks atas pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan peran sosial, serta kemandirian ekonomi penduduk miskin dan rentan di Kota Bandung.	0.45	0.5	Indeks	Semakin tinggi nilai indeks maka tingkat kesejahteraan sosial suatu daerah semakin baik

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
	4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Pengukuran atas pemberian layanan kepada public yang diberikan kepada masyarakat dimana komponen perhitungannya yaitu persyaratan layanan, prosedur layanan, waktu, biaya, produk layanan, kompetensi pemberi layanan serta perilaku pemberi layanan	Mengacu pada PERMENPAN RB NO. 14 Tahun 2017 Tentang SKM.	85	85	Indeks	Tingkat Pelayanan Baik

**26. DINAS SUMBER DAYA ALAM DAN BINA MARGA**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA</b>	1	Meningkatnya pelayanan jalan	Tingkat kemantapan jalan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.	(panjang jalan dalam kondisi baik ditambah panjang jalan dalam kondisi sedang) dibagi panjang jalan kota (sesuai SK Jalan) dikali 100%	94,00	95,00	%	Semakin tinggi nilai tingkat kemantapan jalan, maka semakin baik tingkat pelayanan jalan.
	2	Menurunnya genangan	Persentase penurunan titik genangan	Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Genangan yang dimaksud adalah air hujan	Jumlah titik genangan dengan tinggi genangan lebih dari 30 cm dan waktu surut lebih dari 60 menit dibagi jumlah titik genangan yang harus ditangani dikali 100%	50,00	41,18	%	Semakin rendah nilai persentase penurunan titik genangan, maka semakin rendah jumlah titik genangan yang terjadi. Berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023, kriteria keberhasilan yang diukur adalah tinggi genangan tidak lebih

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.					dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit.
	3	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).	Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot dibagi Jumlah Unsur  IKM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	85,70	85,80	poin	Semakin tinggi nilai IKM, maka semakin baik persepsi masyarakat atas kinerja pelayanan publik pada Perangkat Daerah.

**27. INSPEKTORAT**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG</b>	1	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 81.00	Penilaian nilai evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Menggunakan 4 Komponen Penilaian, diantaranya: 1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30) 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30) 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25) Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa subkriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen	83.33	88.33	%	Semakin bertambah persentase perangkat daerah yang mendapat nilai LHE SAKIP minimal 81,00, maka semakin meningkat akuntabilitas birokrasi di Pemerintah Kota Bandung

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan <i>range</i> nilai antara 0 s.d 100. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mengukur dampak evaluasi pada peningkatan kinerja (capaian renstra). Memotret cascading dan crosscutting Memotret sistem reward dan punishment Memotret dampak implementasi SAKIP terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja.				
	2.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP, dengan perhitungan maturitas telah diatur dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang mencakup penilaian mandiri dan evaluasi oleh BPKP mencakup penilaian secara terintegrasi atas :	3,00	3,00	Angka	Pada tahap ini Pemerintah Kota Bandung telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaiannya

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pe merintah Daerah (hasil <i>Quality Assurance</i> BPKP RI).	a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Risiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; 5) Pemantauan. b. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).				telah relevan, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan agar lebih efektif.
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara, pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni penerimaan ( <i>revenue</i> ) dan belanja ( <i>expenditure</i> ). Korupsi pada sisi penerimaan	100	100	%	Perangkat daerah yang tidak mendapat rekomendasi pengembalian material ke kas daerah berindikasi korupsi.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					<p>negara menjadi fokus, karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Korupsi pada sisi belanja terutama pada proses penencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional.</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi, dengan formulasi pengukuran (Jumlah perangkat daerah yang tidak mendapat rekomendasi pengembalian ke kas</p>				

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					daerah dibagi Jumlah seluruh perangkat daerah yang diawasi) x 100%.				
			Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level Kapabilitas APIP, dengan perhitungan level kapabilitas telah diatur dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP (hasil <i>Quality Assurance</i> BPKP RI)	Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan ( <i>enabler</i> ), Aktivitas Pengawasan ( <i>delivery</i> ), dan Kualitas Pengawasan ( <i>result</i> ).	3	3	Angka	Setiap tingkat kapabilitas menunjukkan karakteristik APIP daerah. Level 3 ( <i>delivered</i> ) dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan ( <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> ) sesuai dengan standar dan praktik profesional

**28. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	1	Meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda per Tahun	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas : 1.Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat; 2.Melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum; 3.Melakukan tindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; 4.Melakukan tindakan yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang	Jumlah Pelanggaran Perda Tahun n dikurangi Jumlah Pelanggaran Perda Tahun n-1 yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Pelanggan Perda Tahun n x 100%	5	4	%	Dengan menurunnya tingkat pelanggaran Perda maka diharapkan kondisi Kota Bandung semakin tertib

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dalam rangka menjaga konsistensi indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Pertahun maka selama 5 tahun target yang akan dicapai adalah adanya penurunan pelanggaran Perda setiap tahunnya. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda tersebut dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu preventif (sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan) dan represif (penindakan yustisi dan sanksi administratif dengan cara pengenaan biaya paksa, penurunan/penyelegalan/sticker peringatan, pengamanan barang bukti pelanggaran, penyerahan pelanggar ke Dinas Sosial (Dinsos), serta pembongkaran bangunan yang tidak memiliki izin).</p>					
			Persentase Satlinmas Kelurahan Aktif	Sesuai Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pasal 1	Jumlah Satlinmas Kelurahan Aktif dibagi jumlah Kelurahan di Kota	22,50	33,75	%	Semakin tinggi Persentase Satlinmas Kelurahan Aktif maka semakin

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>ayat (8) Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.</p> <p>Pasal 1 ayat (9) Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk</p>	Bandung di kali 100%				meningkat ketenteraman dan ketertiban umum khususnya di tingkat kelurahan

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas. Adapun kriteria Satlinmas aktif adalah secara kumulatif memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas;</li> <li>2. Rencana Kerja Tahunan Satlinmas;</li> <li>3. Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas;</li> <li>4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas;</li> <li>5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas;</li> <li>6. Laporan Tahunan Satlinmas;</li> <li>7. Minimal mempunyai 25% siskamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepengurusan/Kelembagaan</li> <li>- Jadwal Piket/Ronda</li> <li>- Daftar Hadir</li> <li>- Buku Laporan Kejadian</li> </ul> </li> </ol>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Sesuai Permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik pasal 1 ayat (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.</p> <p>Pasal 1 ayat (2) Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.</p> <p>Pengukuran IKM ini dilakukan melalui hasil survey 9 kriteria SKM baik dilakukan oleh pihak internal maupun oleh lembaga lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	<p>Nilai Indeks X Nilai Dasar</p> <p>Survei mandiri/ pihak ke3 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	85	85	Nilai	Semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat maka semakin tinggi pula kinerja Satpol PP dalam mewujudkan meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

**29. SEKRETARIAT DAERAH**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan segala permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sampai kepada ketetapan berupa Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota ataupun cukup diselesaikan dengan tindaklanjut atau Rekomendasi. Pada pencapaian 100% Indikator ini bukan berarti setiap masalah harus diselesaikan sampai benar-benar tidak ada lagi permasalahan, pencapaian 100% bisa dicapai juga dengan melakukan upaya	Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai prosedur/ Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bidang kesra, perekonomian, administrasi umum terdokumentasi x 100% (per Triwulan)	100	100	%	Jika tindaklanjut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meningkat persentasenya, maka semakin meningkat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				tindak lanjut saja ataupun berupa rekomendasi. Apabila pada tahun berjalan tidak terdapat masalah yang perlu ditindaklanjuti maka secara otomatis pencapaian Indikator adalah 100%, Hal ini dikarenakan definisi indikator ini bukan berarti menunggu dan mengkompulir munculnya permasalahan saja lebih dari itu mencegah masalah muncul adalah lebih utama. Permasalahan ini bisa diperoleh melalui pengaduan, melalui media maupun menggali permasalahan langsung, juga dapat berupa permasalahan yang sudah terstruktur mendapatkan dasar					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>ketetapan peraturan/kebijakan sebelumnya ataupun yang belum mendapatkan peraturan daerah/kebijakan atau bersifat Insidentil</p> <p>Eviden Indikator bisa berupa: Daftar identifikasi permasalahan, tindaklanjut, implementasi kebijakan.</p> <p>Tindak Lanjut Indikator bisa berupa: 1)Telaan Staff 2)Cek Lapangan 3) Pembahasan/Notulensi 4) Rekomendasi</p> <p>Didalam pembahasan indikator ini tentu terdapat fokus dan lokus agar efektif dan tepat sasaran dan</p>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				sesuai kewenangan serta sesuai Tugas dan Fungsi oleh karena itu batasan cakupan indikator ini dibatasi oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung					
	2		Nilai EPPD	Nilai EPPD adalah nilai angka yang diperoleh berdasarkan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kementerian PANRB diantaranya melalui penilaian komponen LPPD, Waktu munculnya Indikator Nilai EPPD adalah bergantung pada turunnya hasil	BAB VI Permendagri 18 Tahun 2020, Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut : No Skor Kinerja Status Kerja 1) 1,00-1,80 Sangat Rendah 2) 1,81-2,60 Rendah 3) 2,61-3,40 Sedang	3.403 3	3.403 3	Nilai	Semakin meningkat Nilai EPPD, menunjukkan semakin meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>penilaian KEMENPANRB Ketercapaian Indikator ini diperoleh dari terpenuhinya target nilai yang sudah ditentukan. Sehubungan nilai ini dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni KEMENPAN RB dan minim kendali dari Pemerintah Kota Bandung maka penempatan target waktu pencapaian indikator ini bisa berubah sewaktu waktu diluar target sebelumnya menyesuaikan keluaranya nilai hasil . Pada upaya pemenuhan Indikator ini bilamana nilai dimaksud tidak muncul dari KEMENPAN RB pada tahun berjalan maka</p>	4) 3,41-4,20 Tinggi 4,21-5,00 Sangat Tinggi				

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi	
						2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				akan tetap dinyatakan tercapai apabila upaya pemenuhannya telah dilaksanakan. Adapun pada realisasi target Indikator akan ditulis N/A sebagai keterangan bahwa upaya pemenuhan Indikator telah maksimal dilaksanakan namun faktor eksternal yakni penilaian KEMENPANRB belum diperoleh sesuai tahun yang telah ditentukan. Sebagai Evidence indikator ini bisa berupa Laporan LPPD, Penilaian Atas Evaluasi LPPD (Nilai EPPD)						
	3		Nilai IKM Setda	NILAI IKM Diperoleh berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat , instrumen pertanyaan dan akumulasi penilaiannya	Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan bagian-bagian setiap semester melalui Aplikasi ESKM pada bagian Organisasi.	87.8	87.9	Nilai	Semakin meningkatnya nilai IKM, menunjukkan semakin meningkatnya	

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi																				
						2022	2023																						
1	2	3	4	5	6	7		8	9																				
				<p>menggunakan aplikasi E-SKM. Setiap Bagian melakukan survei sehingga muncul nilai hasil Survei masing-masing Bagian, hasil survei diinput kembali kedalam sistem E-SKM sehingga diakumulasikan secara otomatis untuk menggambarkan nilai capaian IKM Setda. Evidence Indikator ini berupa lembar hasil penilaian dan rekap capaian Nilai IKM pada E-SKM Indikator ini tercapai bila Nilai IKM Akumulasi satu Sekretariat Daerah tercapai sesuai target yang telah ditentukan, didalam pelaksanaannya Indikator ini memperhatikan beberapa aturan hukum diantaranya</p>	<p>Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Internal (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (x)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-2,5996</td> <td>25,00-64,99</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60-3,064</td> <td>65,00-76,60</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644-3,532</td> <td>76,61-88,30</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324-4,00</td> <td>88,31-100,00</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Internal (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A				<p>penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah</p>
Nilai Persepsi	Nilai Internal (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)																										
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D																										
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C																										
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B																										
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A																										

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Berdasarkan Permenpan No. 16 Tahun 2014, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Pada Indikator Kinerja Ini dimaksudkan untuk mengetahui Kumulasi total Nilai IKM atas pelayanan pada setiap Bagian Setda melalui aplikasi eskm Kota Bandung					

### 30. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dinas/Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi/ Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Sekretariat DPRD Kota Bandung	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap fasilitasi kebutuhan kerja DPRD	Melakukan survey kepuasan terhadap fungsi-fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Dewan, antara lain : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD	$\frac{\text{Jml. Dewan yg Puas}}{\text{Juml. Anggota DPRD}} \times 100\%$	90	95	%	Tolok ukur keberhasilan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD adalah dengan meningkatnya persentasi Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD

**31. KECAMATAN ANDIR**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN ANDIR</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	59.19	61.92	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Andir	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	61.11	72.22	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Andir	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>SK / SP</li> <li>Ada Program Kerja</li> <li>Monitoring Rawan Jentik</li> <li>Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	50	66.67	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Andir	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Andir	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	81.8	85	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Andir

**32. KECAMATAN ANTAPANI**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN ANTAPANI</b>	1	Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	81	81,50	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Antapani	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	78	80	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Antapani	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	75	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> 9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Antapani	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Antapani (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	86.5	87	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Antapani.

### 33. KECAMATAN ARCAMANIK

Dinas/ Badan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target	Satuan	Interpretasi
-----------------	----	---------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	--------	--------------

(Perangkat Daerah)						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN ARCAMANI K</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	75,69	81,40	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Arcamanik	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :  1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	83.33	87.04	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Arcamanik	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>SK / SP</li> <li>Ada Program Kerja</li> <li>Monitoring Rawan Jentik</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	75,00	100,00	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> 7. Kangpisman (Ekbang) 8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> 9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	84,00	85,00	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arcamanik.

**34. KECAMATAN ASTANAANYAR**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN ASTANAANYAR</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	75	78	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Astanaanyar	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	63	76	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Astanaanyar	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	83	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Astanaanyar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Astanaanyar	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	84	85,5	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Astanaanyar.

**35. KECAMATAN BABAKAN CIPARAY**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN BABAKAN CIPARAY</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	82	82.50	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW</li> <li>9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li> <li>10. Sosialisasi Urban Farming</li> <li>11. Sosialisasi ODF</li> <li>12. Taman Tematik ramah disabilitas</li> <li>13. Bandung Tanginas</li> <li>14. Penguatan Kelembagaan</li> <li>15. Kelompok Lansia Sehat</li> <li>16. Fasilitasi posyandu lingkup RW</li> <li>17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK</li> <li>18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga</li> <li>19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</li> <li>20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah</li> <li>21. RW siaga</li> <li>22. Pembinaan Posyandu</li> <li>23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA</li> <li>24. Melakukan pelatihan UEP</li> <li>25. Pendataan PMKS dan PSKS</li> <li>26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</li> <li>27. Event Olah Raga</li> <li>28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</li> <li>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM</li> <li>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :  1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	52.60	61.40	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay	Persentase Kelurahan Unggul	Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.  Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	75	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengujung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> </li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per</li> </ol>				kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.	

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul>					
				6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul>					
				7. Kangpisman (Ekbang)					
				8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul>					
				9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul>					
				10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Babakan Ciparay	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	81.80	85.70	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Babakan Ciparay.

**36. KECAMATAN BANDUNG KIDUL**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN BANDUNG KIDUL</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	77	86	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW</li> <li>9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li> <li>10. Sosialisasi Urban Farming</li> <li>11. Sosialisasi ODF</li> <li>12. Taman Tematik ramah disabilitas</li> <li>13. Bandung Tanginas</li> <li>14. Penguatan Kelembagaan</li> <li>15. Kelompok Lansia Sehat</li> <li>16. Fasilitasi posyandu lingkup RW</li> <li>17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK</li> <li>18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga</li> <li>19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</li> <li>20. Gerakan Kebersihan dan peanfaatan sampah</li> <li>21. RW siaga</li> <li>22. Pembinaan Posyandu</li> <li>23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA</li> <li>24. Melakukan pelatihan UEP</li> <li>25. Pendataan PMKS dan PSKS</li> <li>26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</li> <li>27. Event Olah Raga</li> <li>28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)</li> <li>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM</li> <li>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang 33. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bandung Kidul	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :  1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	65	70	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bandung Kidul	Persentase Kelurahan Unggul	Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.  Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	100	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq</math> 30 exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengujung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> </li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per</li> </ol>				yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.	

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> 6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> 7. Kangpisman (Ekbang)           8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> 9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bandung Kidul	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandung Kidul	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	87	88	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandung Kidul.

**37. KECAMATAN BANDUNG KULON**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN BANDUNG KULON</b>	1	Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	84,5	85	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bandung Kulon	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	75	85	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bandung Kulon	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	75	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> 9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bandung Kulon	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandung Kulon (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	84,5	85	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandung Kulon.

### 38. KECAMATAN BANDUNG WETAN

Dinas/ Badan	No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Target	Satuan	Interpretasi
--------------	----	---------	-----------	----------------------	-----------	--------	--------	--------------

(Perangkat Daerah)			Sasaran		Pengukuran	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN BANDUNG WETAN</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	84.44	86.67	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bandung Wetan	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	80.56	83.33	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)					
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bandung Wetan	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat</li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	100.00	100.00	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> 4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpisah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> 5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> 6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandung	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	83.25	83.50	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Kecamatan Bandung Wetan	Wetan(IKM)						Kecamatan Bandung Wetan.

**39. KECAMATAN BATUNUNGGAL**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN BATUNUNGGAL</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	82,38	87,15	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Batununggal	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah: 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	79,52	81,93	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)					
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Batununggal	Persentase Kelurahan Unggul	Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.  Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah: 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> </ul>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	75,00	87,50	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi: Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Batununggal	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	85,00	86,00	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Batununggal							publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batununggal.

40. KECAMATAN BOJONGLOA KALER

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN BOJONGLOA KALER</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	80.00	100.00	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	100.00	100.00	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kaler	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp</li> <li>Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat</li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	100.00	100.00	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> 4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> 5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> 6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math></li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<ul style="list-style-type: none"> <li>11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	84.40	85.00	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bojongloa

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Bojongloa kaler							kaler.

**41. KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN N BOJONGLO A KIDUL</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	78.00	80.00	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang</p> <p>Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bojongloa Kidul	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	65.91	72.73	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kidul	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	83.33	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> <li>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> </ul> </li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>1. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bojongloa Kidul	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongloa Kidul (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	85.00	86.00	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bojongloa Kidul.

**42. KECAMATAN BUAHBATU**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN BUAHBATU</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	74,63	76,12	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Buahbatu	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	63,64	67,27	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)					
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Buahbatu	Persentase Kelurahan Unggul	Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.  Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah : 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> </ul>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	75	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan	Nilai Indeks Kepuasan	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat	Rata-rata IKM Kecamatan	84,00	85,00	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu	Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu(IKM )	kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	dan kelurahan				masyarakat semakin puas terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Buahbatu.

**43. KECAMATAN CIBEUNYING KALER**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN CIBEUNYING KALER</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	68.97	79.31	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibeunying Kaler	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	54.35	62.22	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kaler	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	50	75	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying kaler	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kaler (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	86.5	86.6	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeunying kaler.

**44. KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL**

Dinas/ Badan/ (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	60.84	83.81	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	49.43	50.57	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)					
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)               <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos)               <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	66.67	66.67	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap	Rata-rata IKM Kecamatan dan	84.78	85	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kidul		kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	kelurahan				puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeunying Kidul

45. KECAMATAN CIBIRU

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN CIBIRU</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	82,00	83,50	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				(Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibiru	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	58,49	66,04	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibiru	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>SK / SP</li> <li>Ada Program Kerja</li> <li>Monitoring Rawan Jentik</li> <li>Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	75,00	100,00	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> <li>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi	
						2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				(Ekbang) - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)						
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	85,00	85,30	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibiru.	

**46. KECAMATAN CICENDO**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN CICENDO</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	81.65	81.70	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>(Co-Working space Kelurahan)</p> <p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cicendo	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	71.43	73.21	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>SK / SP</li> <li>Ada Program Kerja</li> <li>Monitoring Rawan Jentik</li> <li>Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	100	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	85.86	85.87	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cicendo.

**47. KECAMATAN CIDADAP**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN CIDADAP</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	83.33	91.66	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cidadap	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	41.21	51.72	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cidadap	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	66.66	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> <li>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				(Ekbang) - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cidadap	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cidadap (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	82	83	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cidadap.

48. KECAMATAN CINAMBO

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN CINAMBO</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	86.21	87.25	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW</li> <li>9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li> <li>10. Sosialisasi Urban Farming</li> <li>11. Sosialisasi ODF</li> <li>12. Taman Tematik ramah disabilitas</li> <li>13. Bandung Tanginas</li> <li>14. Penguatan Kelembagaan</li> <li>15. Kelompok Lansia Sehat</li> <li>16. Fasilitasi posyandu lingkup RW</li> <li>17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK</li> <li>18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga</li> <li>19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</li> <li>20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah</li> <li>21. RW siaga</li> <li>22. Pembinaan Posyandu</li> <li>23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA</li> <li>24. Melakukan pelatihan UEP</li> <li>25. Pendataan PMKS dan PSKS</li> <li>26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN</li> <li>27. Event Olah Raga</li> <li>28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				(Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cinambo	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	91.3	91.38	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cinambo	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	100	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cinambo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cinambo (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	83.91	86.00	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cinambo.

49. KECAMATAN COBLONG

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN COBLONG</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	93,71	95,46	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang</p> <p>Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cobleng	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	65	65	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cobleng	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	70,97	72,37	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				<p>(PSN)</p> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022)</p>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
				(Ekbang) - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Coblong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Coblong (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	94,97	87	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Coblong

50. KECAMATAN GEDEBAGE

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN GEDEBAGE</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	70	80	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Gedebage	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	87	88	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Gedebage	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kPojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	100	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Gedebage	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gedebage (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	84,5	85	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gedebage

**51. KECAMATAN KIARACONDONG**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN KIARACONDONG</b>	1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Kiaracondong	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di Kecamatan dikali 100%	96,47	98,82	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah
	2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul	75,00	76,00	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Kiaracondong		<p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW</li> <li>9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li> </ol>	dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan x 100%				melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	3	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracandong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracandong	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	84,2 5	85,25	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kiaracandong
	4	Meningkatnya Penyelenggara an Pemerintahan Kecamatan Kiaracandong	Persentase Kelurahan Unggul	Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria Kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa Kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.  Adapun kriteria capaian Kelurahan unggul adalah : 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)  - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca  - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	83,3 3	100,0 0	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di Kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> <p>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah</p>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				(Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)					

**52. KECAMATAN LENGKONG**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN LENGKONG</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	69.75	70.58	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Lengkong	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	59.87	64.03	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lengkong	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	100	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Lengkong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	85.35	85.75	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lengkong.

**53. KECAMATAN MANDALAJATI**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN MANDALAJATI</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	79	80	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> <li>7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air</li> <li>8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW</li> <li>9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif</li> <li>10. Sosialisasi Urban Farming</li> <li>11. Sosialisasi ODF</li> <li>12. Taman Tematik ramah disabilitas</li> <li>13. Bandung Tanginas</li> <li>14. Penguatan Kelembagaan</li> <li>15. Kelompok Lansia Sehat</li> <li>16. Fasilitasi posyandu lingkup RW</li> <li>17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK</li> <li>18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga</li> <li>19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK</li> <li>20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah</li> <li>21. RW siaga</li> <li>22. Pembinaan Posyandu</li> <li>23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA</li> <li>24. Melakukan pelatihan UEP</li> <li>25. Pendataan PMKS dan PSKS</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Mandalajati	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :  1. Adanya Pengurus	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	62	68	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)					
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Mandalajati	Persentase Kelurahan Unggul	Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.  Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah : 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	75	75	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan	Nilai Indeks Kepuasan	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat	Rata-rata IKM Kecamatan dan	84	85	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	Masyarakat (IKM) Kecamatan Andir	kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	kelurahan				masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mandalajati.

54. KECAMATAN PANYILEUKAN

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN PANYILEUKAN</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	70	80	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Panyileukan	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	56,76	64,86	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Panyileukan	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>SK / SP</li> <li>Ada Program Kerja</li> <li>Monitoring Rawan Jentik</li> <li>Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	100	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> <li>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi	
						2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				(Ekbang) - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)						
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Panyileukan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panyileukan	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	85,2	85,4	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panyileukan.	

**55. KECAMATAN RANCASARI**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN RANCASARI</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rukun Warga (RW);</li> <li>6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>8. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	78	79	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreativitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Rancasari	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah : 6. Adanya Pengurus 7. Adanya Kelompok Siskamling 8. Adanya Jadwal Siskamling	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	75	80	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>9. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</p> <p>10. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</p>					
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rancasari	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp</li> <li>Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	100	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> </ul> </li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> <li>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> </li> <li>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> </li> <li>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</li> </ul>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Rancasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rancasari (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	85.50	86	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rancasari.

**56. KECAMATAN REGOL**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN REGOL</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	67.90	69.14	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Regol	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	85.00	91.67	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Regol	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq</math> 30 exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	57.14	71.42	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Regol	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Regol	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	83.80	84.00	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Regol.

**57. KECAMATAN SUKAJADI**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN SUKAJADI</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	79,00	79,50	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Sukajadi	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :  1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	73,47	83,67	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)					
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukajadi	Persentase Kelurahan Unggul	Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.  Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah : 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) - Gerakan Maghrib	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	80	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>Mengaji,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				<p>perempuan (KDRT)</p> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul</p>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				(Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> 9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukajadi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	84,00	85,00	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukajadi.

**58. KECAMATAN SUKASARI**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
<b>KECAMATAN SUKASARI</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	82	85	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Sukasari	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Adapun kriteria Siskamling RW Aktif : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	80	85	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukasari	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>SK / SP</li> <li>Ada Program Kerja</li> <li>Monitoring Rawan Jentik</li> <li>Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	75	90	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> <p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sukasari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sukasari (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	84	85	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukasari.

**59. KECAMATAN SUMUR BANDUNG**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN SUMUR BANDUNG</b>	1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	77.50	80	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pemba- ngunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pem- bangunan sesuai ruang lingkup LPM 30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 31. Pendataan Profil Kelurahan 32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat KECAMATAN SUMUR BANDUNG	Persentase siskamling RW Aktif	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.  Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah : 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	56.76	62.16	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)					
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan KECAMATAN SUMUR BANDUNG	Persentase Kelurahan Unggul	Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.  Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah : 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp</li> <li>- Koran2 / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> </ul>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	75	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak keluarahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> <p>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> </ul> <p>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> <p>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> <p>7. Kangpisman (Ekbang)</p> <p>8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi <math>\geq</math> 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> <p>9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> <p>10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)</p>					
	4	Meningkatnya Kepuasan	Nilai Indeks Kepuasan	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat	Rata-rata IKM Kecamatan dan	84	85	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Masyarakat terhadap Pelayanan Publik KECAMATAN SUMUR BANDUNG	Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung (IKM)	kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	kelurahan				semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumur Bandung.

**60. KECAMATAN UJUNG BERUNG**

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>KECAMATAN UJUNGBERUNG</b>	1	Meningkatnya PEMBERDAYAAN Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan Unggul	<p>Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.</p> <p>Lembaga masyarakat ini terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Warga (RW);</li> <li>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan</li> <li>4. Karang Taruna (Karta).</li> </ol> <p>Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Masyarakat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD.</p> <p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah</li> <li>2. Urban Farming</li> <li>3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang</li> <li>5. Penanaman Pohon</li> <li>6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana</li> </ol>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	70	80	%	Semakin tinggi nilai persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul menunjukkan semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan yang menunjang RPJMD

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan 15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. RW siaga 22. Pembinaan Posyandu 23. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 24. Melakukan pelatihan UEP 25. Pendataan PMKS dan PSKS 26. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 27. Event Olah Raga 28. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan)					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<p>29. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM</p> <p>30. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna)</p> <p>31. Pendataan Profil Kelurahan</p> <p>32. Rembug Warga/Pra Musrenbang Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW.</p>					
	2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Ujungberung	Persentase siskamling RW Aktif	<p>Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibmas ini, dibuatlah Sistem Keamanan Lingkungan atau yang lebih akrab disebut dengan Siskamling. Siskamling ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.</p> <p>Adapun kriteria Siskamling RW Aktif adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pengurus</li> <li>2. Adanya Kelompok Siskamling</li> <li>3. Adanya Jadwal Siskamling</li> <li>4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling</li> <li>5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</li> </ol>	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	94.92	100	%	Semakin tinggi Persentase Siskamling Aktif maka semakin tinggi siskamling yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ujungberung	Persentase Kelurahan Unggul	<p>Terdapat 10 (sepuluh) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. Namun demikian dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi minimal 5 (lima) dari 10 kriteria.</p> <p>Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca</li> <li>- Memiliki koleksi buku <math>\geq 30</math> exp</li> <li>- Koran<sup>2</sup> / majalah langganan kelurahan</li> <li>- Ada laporan pengunjung</li> </ul> </li> <li>2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Maghrib Mengaji,</li> <li>- Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah,</li> <li>- Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),</li> <li>- Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an),</li> </ul> </li> <li>3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK / SP</li> <li>- Ada Program Kerja</li> <li>- Monitoring Rawan Jentik</li> <li>- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu</li> </ul> </li> </ol>	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	80	100	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di kelurahan.

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</li> <li>4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah</li> <li>- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>- Pelatihan pelatihan</li> <li>- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)</li> </ul> </li> <li>5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK</li> <li>- Memiliki data anak</li> <li>- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> <li>6. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal untuk 5 rumah</li> <li>- Jarak dengan sumber air bersih <math>\geq</math> 11 meter</li> <li>- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</li> <li>- Menggunakan pipa paralon</li> <li>- Menggunakan bak kontrol</li> </ul> </li> <li>7. Kangpisman (Ekbang)</li> </ul>					

Dinas/ Badan (Perangkat Daerah)	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target		Satuan	Interpretasi
						2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				8. Adanya koperasi unggul (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2022) (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Koperasi ≥ 20 orang</li> <li>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</li> <li>- Memiliki Akte Pendirian</li> <li>- Ada usaha simpan pinjam</li> </ul> 9. Adanya Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengurus</li> <li>- Ada Anggota</li> <li>- Ada AD/ART</li> </ul> 10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)					
	4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Ujungberung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ujungberung (IKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	84	85	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungberung.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKOR HUKUM PADA SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA BANDUNG



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

YANA MULYANA